



**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP  
BELANJA DAERAH MELALUI DANA PERIMBANGAN  
SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA  
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI  
SUMATERA UTARA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains  
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

**ELMA PERMATA SARI BR.PERNANGIN**  
NPM : 1515100402

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2019**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : ELMA PERMATA SARI BR.PERNANGIN  
NPM : 1515100402  
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI  
JENJANG : S1 (STARA SATU)  
JUDUL : PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH  
TERHADAP BELANJA DAERAH MELALUI  
DANA PERIMBANGAN SEBAGAI VARIABEL  
INTERVENING

Medan, 22 Oktober 2019

**KETUA PROGRAM STUDI**

(Junawan, S.E., M.Si)



(Dr. Surya Nita, S.P., M.Hum)

**PEMBIMBING I**

(Rahima Br. Purba, S.E., M.Si, AK., CA)

**PEMBIMBING II**

(Junawan, S.E., M.Si)



**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN**

SKRIPSI DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH PANITIA UJIAN SARJANA  
Lengkap FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
**PERSETUJUAN UJIAN**

NAMA : ELMA PERMATA SARI BR.PERNANGIN  
NPM : 1515100402  
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI  
JENJANG : S1 (STARA SATU)  
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH  
TERDAP BELANJA DAERAH MELALUI  
DANA PERIMBANGAN SEBAGAI  
VARIABEL INTERVENING

MEDAN, 22 Oktober September 2019



(Junawan, S.E., M.Si)

ANGGOTA II

(Yunita Sari Rioni, S.E., M.Si)

ANGGOTA I

(Rahima Br. Purba, S.E., M.Si, AK., CA)

ANGGOTA III

(Oktarina Khamilah Siregar, SE., M.Si)

ANGGOTA IV

(Fitri Yani Panggabean, SE., M.Si)

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : ELMA PERMATA SARI BR.PERNANGIN

NPM : 1515100402

PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP  
BELANJA DAERAH MELALUI DANA PERIMBANGAN  
SEBAGAI VARIABEL INTERVENING

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Unpab untuk menyimpan, mengahli-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Penyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia

- menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 30 September 2019

Penulis



Elma Permata Sari Br.Pernangin

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : ELMA PERMATA SARI BR.PERNANGIN  
NPM : 1515100402  
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI  
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP  
BELANJA DAERAH MELALUI DANA PERIMBANGAN  
SEBAGAI VARIABEL INTERVENING

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan dimasa yang akan mendatang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 30 September 2019

Penulis



Elma Permata Sari Br.Pernangin

Telah Diperiksa oleh LPMU dengan Plagiarisme... 58 %

FM-BPAA-2012-041

Permohonan Meja Hijau



Medan, 24 Oktober 2019  
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan  
Fakultas SOSIAL SAINS  
UNPAB Medan  
Di -  
Tempat



Yang hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ELMA PERMATA SARI BR PERHANGIN  
Tempat/Tgl. Lahir : Binjai / 11 Oktober 1996  
Nama Orang Tua : MUJURI PERHANGIN  
No. Ak : 1515100402  
Jurusan : SOSIAL SAINS  
Program Studi : Akuntansi  
No. HP : 085261881529  
Alamat : Dusun III Gunung Tinggi Pasar

ingin bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Melalui Dana Perimbangan sebagai Variabel Intervening pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, oleh karena itu saya menyatakan :

- Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
- Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
- Telah tercapai keterangan bebas pustaka
- Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
- Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
- Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
- Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wtsuda sebanyak 1 lembar
- Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jenuk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
- Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
- Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
- Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
- Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100,000
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	0
<b>Total Biaya</b>	<b>: Rp.</b>	<b>2,100,000</b>
<b>5. Uang Kuliah</b>	<b>Rp</b>	<b>2,625,000</b>
		<b>4,725,000</b>

M 24/10/19  
Dra

Ukuran Toga : **S**



Hormat saya  
ELMA PERMATA SARI BR PERHANGIN  
1515100402

- catatan :
- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila :
    - a. Telah dikap bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
    - b. Melampirkan bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
  - 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (astl) - Mhs.ybs.



**mandiri**  
SYARIAH

Transaksi: 19115100402

Temp. Revisi/PTA Supl. Ek. P. P. MANDIRI

**Rekening Sumber**

**Rekening:**

7118426211 - SALDO REK. BANKING KK MEDAN PANBUDI

19 Oktober 2019

**Data Pembayaran**

**Tanggal / Jam:**

29-10-2019 10:08:59

**Terminal:**

E791878951

**Jenis Pembayaran:**

AKADEMIK (MULYAPANCA) FAK EKONOMI

**Jumlah:**

4.727.500,00

**Nama:**

ELMA PERLING A SARI BR. PERWANGIN

**Nomor:**

1515109402001

**Institusi:**

UNIVERSITAS PANCA SUDHA

**Info 1:**

SOSIAL SAINS 2019 ANKUTRANSI S

**Info 2:**

BY SIDANG BY MELDOK BY ABS PUS

**No. Referensi:**

000004727500

**No. Transaksi:**

FT18302XFPT77

**No. Struk:**

00278875

4.727.500,00  
Rp 4.727.500,00

dan uang tunai

*Handwritten signature*

->> detail -

Copy Right © 2019 - PT. Bank Syariah Mandiri

PT BANK SYARIAH MANDIRI  
Kantor: Ksp. Panca Sudha  
**29 OCT 2019**  
P.A.M.A./  
Teller

089261081529



# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fakultas Ekonomi UNPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km, 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

## PERMOHONAN MENGAJUKAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : ELMA PERMATA SARI BR.PERNANGIN  
 Tanggal Lahir : / 11 Oktober 1996  
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1515100402  
 Jurusan Studi : Akuntansi  
 Bidang Studi : Akuntansi Sektor Publik  
 Kredit yang telah dicapai : 125 SKS, IPK 3.62

Ini mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang ilmu, dengan judul:

Judul SKRIPSI	Persetujuan
Pengaruh program Tax Amnesty terhadap perubahan penyusunan laporan keuangan Badan dan Pembayaran Pajaknya	<input type="checkbox"/>
Jampak program Tax Amnesty pada penyusunan Laporan Keuangan WP badan	<input type="checkbox"/>
Jampak Tax Amnesty Terhadap perubahan penyusunan laporan Keuangan Wp Badan (PSAK 70)	<input checked="" type="checkbox"/>

Yang disetujui oleh Kepala Program Studi dibenarkan tanda



Rektor  
 ( Ir. Bhakti Alamsvah, M.T., Ph.D. )

Medan, 11 Oktober 2018

Pemohon,  
 ( Elma Permata Sari Br.pernangin )

Honor : .....  
 Tanggal : .....  
 Disahkan oleh :  
 Dekan  
 ( Dr. Surya Nita, S.P., M.Hum. )  
 Tanggal : 11 Oktober 2018  
 Disetujui oleh:  
 Ka. Prodi Akuntansi  
 ( Anggi Pratama Nasution, SE., M.Si )

Tanggal : .....  
 Disetujui oleh :  
 Dosen Pembimbing I :  
 ( Rohana Br. Perbe, SE, M.Si, Ak, CA )  
 Tanggal : 27-10-2018  
 Disetujui oleh:  
 Dosen Pembimbing II :  
 ( ..... )

No. Dokumen: FM-LPPM-08-01

Revisi: 02

Tgl. Eff: 20 Des 2015





# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jln. Jend. Gatot Subroto Km.4,5 PO.BOX.1099 Telp. (061) 8455571 Medan  
Email : [fasosa@pancabudi.ac.id](mailto:fasosa@pancabudi.ac.id) <http://www.pancabudi.ac.id>

## BERITA ACARA PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

ini, Senin... Tanggal, 4.. Bulan, ..November.. Tahun, ...2019....., telah  
akan Ujian Meja Hijau Pada Program Studi .....Akuntansi..... Semester  
:ademiK ..... bagi mahasiswa/i atas nama :

.....  
: Elma Permata Sari br. Pernangin  
: 1515100402  
Program Studi : Akuntansi  
Tanggal Ujian : 4 November 2019  
Skrripsi Lama : Dampak Tax Amnesty Terhadap Perubahan Penyusunan  
Laporan Keuangan PSAK 70  
Skrripsi Baru : Pengaruh Pendapatan asli daerah terhadap Belanja  
Daerah melalui Dana Perimbangan sebagai Variabel  
Intervening Pada Kabupaten /Kota di Provinsi Sumatera Utara

dikatakan benar bahwa dalam pelaksanaan ujian Meja Hijau mahasiswa  
:but diatas telah terjadi perubahan judul skripsi yang telah dikendaki oleh  
:ta Ujian Meja Hijau.

JABATAN	NAMA DOSEN	TANDA TANGAN
Ketua Penguji/ Ketua Program Studi	Yunita Sari Rioni SE., M.si	
Anggota I/ Pembimbing I	Rahima br. Purba SE M.SI AKSA	
Anggota II/ Pembimbing II	Junawan, SE M.Si	
Anggota III/ Penguji I	OKtarni Khamilah SE Msi	
Anggota IV/ Penguji II	Fitri Yani Panggabean, SE.MSi	



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jln. Jend.Gatot Subroto Km.4,5 Telp.(061) 50 200 511 PO.BOX.1099 Medan.  
<http://www.pancabudi.ac.id>

**BERITA ACARA KOREKSI**

ini Senin, Tanggal 4 November 2019, Pukul .....Wib, bertempat di  
Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan telah dilaksanakan Sidang  
kepada :

: Elma Permata Sari br. Pernangin  
: 1515100402

Studi : Akuntansi

ipisi : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah melalui Dana  
Perimbangan sebagai Variabel Intervening pada kabupaten/kota  
di Provinsi Sumatera Utara

ng - I : Rahima br. Purba SE MSIAFCA,

ng - II : Junawan SE M.Si

an hasil dari Tim Meja hijau, bahwa Skripsi yang disidangkan dianggap masih perlu disempurnakan  
tersebut sebagai berikut :

Materi Perbaikan

sebutkan unsur-unsur PAD

sebutkan Undang-undang Pemerintah pusat tentang otonomi daerah  
alasan pengambilalihan Sampel

Indikator

Penguji II

Penguji III

Penguji IV

Penguji V

F

Acc Jitrod lux  
30/11/2019.



Acc Jitrod lux  
30/11/2019

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP  
BELANJA DAERAH MELALUI DANA PERIMBANGAN  
SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA  
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI  
SUMATERA UTARA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains  
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

**ELMA PERMATA SARI BR. PERNANGIN**  
NPM : 1515100402

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2019**



Universitas Pembangunan Panca Budi  
SOSIAL SAINS  
Simbing I .....  
Simbing II .....  
Niswa : ELMA PERMATA SARI BR. PERNANGIN  
Program Studi : Akuntansi  
NIM Mahasiswa : 1515100402  
Terdidikan .....  
Akhir/Skripsi .....

AL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
016.	Rumusan Masalah ↔ Tujuan ↔ Hipotesis		
017.	Bab I → teori, literatur Review, Hipotesis kerangka konseptual & Bab II		
018.	BAB III.		
019.	Kesimpulan		
2019.	Acc Sidang	 Acc Sidang 25/9-2019.	

Medan, 25 September 2019  
Diketahui/Disetujui oleh :  
Dekan,



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571  
website : www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id  
Medan - Indonesia

Dasar : Universitas Pembangunan Panca Budi  
Membimbing I : SOSIAL SAINS  
Membimbing II : Rahimak Purba, S.E., M.Si., Ak., CA  
Mahasiswa : Junawan, S.E., M.Si  
Program Studi : ELMA PERMATA SARI BR.PERNANGIN  
NIM : Akuntansi  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1515100402  
Pendidikan : Strata 1.  
Tanggal Pengantar :  
Judul Skripsi :  
: .....

NO	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
21/10/2019	Pembahasan Daftar isi	[Signature]	
	Pembahasan Tabel (Gaya Typing benar)	[Signature]	
22/10/2019	Revisi Subj. Muz. Ayu	[Signature]	

Medan, 25 September 2019  
Diketahui/Disetujui oleh :  
Dekan,



Dr. Surya Nita, S.P., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571  
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id  
 Medan - Indonesia

s : Universitas Pembangunan Panca Budi  
 : SOSIAL SAINS

mbimbing I : JUNJUAN SE., M.Si

mbimbing II : ELMA PERMATA SARI BR. PERNANGIN

hasiswa : Akuntansi

Program Studi : 1515100402

Level Mahasiswa : STRATA 1 (S1)

Pendidikan : DAMPAK TAX AMNESTY TERHADAP PERUBAHAN PENYUSUNAN

Tugas Akhir/Skripsi : LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN BAK 70 DAN PMK 118

KADA PERUSAHAAN DI KPP PRATAMA BINJAI

WAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
1/2019	- Perbaiki Form Tabel, Gct - Form Corr - Perbaiki Daftar Perhitungan		
2/2019	- Perbaiki isi Tabel Perhitungan - Jurnal		
3/2019	Acc Sur jurnal		

Medan, 06 Februari 2019  
 Diketahui/Disetujui oleh :  
 Dekan,

Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571  
website : www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id  
Medan - Indonesia

sitas : Universitas Pembangunan Panca Budi  
 as : SOSIAL SAINS  
 Pembimbing I : Rahma Br Purba, SE., Msi., Ak., CA  
 Pembimbing II :  
 Mahasiswa : ELMA PERMATA SARI BR.PERNANGIN  
 an/Program Studi : Akuntansi  
 r Pokok Mahasiswa : 1515100402  
 yg Pendidikan : Strata 1 (S1)  
 Tugas Akhir/Skripsi : DAMPAK TAX AMNESTY TERHADAP PERUBAHAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN PSAK 70 DAN PMF NOMOR 118 PADA PERUSAHAAN DI KPP PRATAMA BINDAI

INGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
1 - 2019.	Latar Belakang Masalah ↔ Rumusan ↔ Tupuan Penelitian. Bab II. Bab III - Sampel		
4 - 2019.	Metodel → Teknik Analisis Porter -		
4 - 2019.	Acc Seminar Proposal		Acc Seminar Propo S1.

Medan, 02 April 2019  
Diketahui/Disetujui oleh :  
Dekan,



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA  
**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

**KARTU KEMAJUAN MAHASISWA  
(KKM)**

ELMA PERMATA SARI BR.PERNANGIN  
1515100402

Program Studi : Akuntansi (S1)  
Konstraksi : Akuntansi Sektor Publik

Code MK	Mata Kuliah	WP	SMT	SKS	NH	NA	K x N
10000101	Pendidikan Agama	W	1	2	A	4	8
10000102	Bahasa Inggris Akuntansi I	W	1	2	B	3	6
10000103	Metafisika I	W	1	2	A	4	8
10000111	Pengantar Akuntansi I	W	1	3	B	3	9
10000112	Pengantar Bisnis	W	1	3	A	4	12
10000113	Pengantar Ekonomi Mikro	W	1	3	A	4	12
10000114	Matematika Ekonomi	W	1	3	A	4	12
10000115	Pengantar Manajemen	W	1	2	A	4	8
10000204	Metafisika II	W	2	2	B	3	6
10000205	Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila	W	2	2	A	4	8
10000206	Bahasa Indonesia/ Penulisan Ilmiah	W	2	2	B	3	6
10000217	Pengantar Aplikasi Komputer	W	2	3	A	4	12
10000218	Statistik Ekonomi I	W	2	2	A	4	8
10000219	Pengantar Akuntansi II	W	2	3	A	4	12
10000220	Pengantar Ekonomi Makro	W	2	3	B	3	9
10000221	Hukum Bisnis dan Regulasi	W	2	3	A	4	12
10000322	Statistik Ekonomi II	W	3	2	A	4	8
10000323	Akuntansi Komputer & Aplikasi	W	3	3	A	4	12
10000328	Akuntansi Biaya I	W	3	3	B	3	9
10000329	Akuntansi Keuangan I	W	3	3	A	4	12
10000330	Manajemen Keuangan I	W	3	3	B	3	9
10000331	Akuntansi Sektor Publik	W	3	3	A	4	12
10000334	Etika Profesi Akuntansi	W	3	3	B	3	9
10000432	Sistem Informasi Akuntansi I	W	4	3	A	4	12
10000433	Akuntansi Biaya II	W	4	3	A	4	12
10000434	Akuntansi Keuangan II	W	4	3	B	3	9
10000435	Bahasa Inggris Akuntansi II	W	4	2	A	4	8
10000436	Akuntansi Perpajakan	W	4	3	B	3	9
10000437	Manajemen Keuangan II	W	4	3	B	3	9
10000438	Akuntansi Syariah	W	4	3	A	4	12
10000541	Teori Akuntansi	W	5	3	A	4	12
10000542	Akuntansi Keuangan Lanjutan I	W	5	3	B	3	9
10000543	Auditing I	W	5	3	A	4	12
10000566	Akuntansi Perpajakan Lanjutan	W	5	3	A	4	12
10002547	Akuntansi Manajemen Publik	W	5	3	A	4	12
10002548	Sistem Pengendalian Manajemen Publik	W	5	3	B	3	9
10002549	Anggaran Sektor Publik	W	5	3	B	3	9
10000627	Metodologi Penelitian Akuntansi	W	6	3	B	3	9
10000651	Auditing II	W	6	3	B	3	9
10000652	Sistem Informasi Akuntansi II	W	6	3	A	4	12



Kode MK	Mata Kuliah	WP	SMT	SKS	NH	NA	K x N
510000667	Perilaku Keorganisasian	W	6	3	A	4	12
510002657	Akuntansi Sektor Publik Lanjutan	W	6	3	A	4	12
510002658	Analisis Laporan Keuangan Publik	W	6	3	B	3	9
510002659	Hukum keuangan Negara	P	6	3			
510002660	Studi Kelayakan Proyek	P	6	3	A	4	12
510000709	Komunikasi Bisnis	P	7	2			
510000710	Metafisika III	W	7	2	A	4	8
510000763	Bisnis Internasional	W	7	3	B	3	9
510000768	Internal Audit	W	7	3	B	3	9
510000772	Manajemen Strategi	P	7	2	A	4	8
510000773	Kewirausahaan	W	7	3	A	4	12
510000774	Kuliah Kerja Nyata/ Magang	W	7	2	A	4	8
510002770	Seminar Akuntansi Publik	W	7	3	B	3	9
510000875	Komprehensif	W	8	2			
510000876	Skripsi	W	8	4			
Jumlah SKS Terambil					140		503
IP Kumulatif					3.59		



Legenda :

- = Wajib/Pilihan
- = Nilai Huruf
- = Nilai Angka

# Plagiarism Detector v. 1092 - Originality Report:

Analyzed document: 21/10/2019 08:35:50

## "ELMA PERMATA SARI P. PERNANGIN\_1515100402\_AKUNTANSI.docx"

Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi\_License4



Relation chart:



Distribution graph:

Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

- % 78 wrds: 8218 <http://jurnal.unswagati.ac.id/index.php/jka/article/download/448/323>
- % 75 wrds: 9083 <https://id.123dok.com/document/6gn458q2-pengaruh-pendapatan-esli-daerah-dana-alokasi-umum-...>
- % 62 wrds: 7644 [http://eprints.unip.ac.id/22687/1/5KRIPSI\\_-\\_NUR\\_INDAH\\_RAHMAWATI.PDF](http://eprints.unip.ac.id/22687/1/5KRIPSI_-_NUR_INDAH_RAHMAWATI.PDF)

or other Sources:]

Processed resources details:

234 - Ok / 36 - Failed

or other Sources:]

Important notes:

Wikipedia:	Google Books:	Ghostwriting services:	Anti-cheating:
Wiki Detected!	[not detected]	[not detected]	[not detected]

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pendapatan asli daerah berpengaruh secara langsung terhadap belanja daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota Sumatera Utara mulai tahun 2014-2017, untuk mengetahui apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja daerah melalui dana perimbangan sebagai variable *intervening* pada Pemerintah Kabupaten/Kota Sumatera Utara mulai tahun 2014-2017. Penelitian ini menggunakan metode asosiatif/kuantitatif dengan pendekatan secara sistematis dalam menjawab rumusan masalah. Hasil penelitian t hipotesis 1 menunjukkan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan uji t hipotesis 2 menunjukkan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah dengan dana perimbangan sebagai variable *intervening*. Dari hasil ujian analisis jalur menunjukkan pengaruh langsung lebih besar terhadap variable belanja daerah.

**Kata Kunci :** Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal.

## **ABSTRACT**

*This study aims to analyze whether regional income affect area expenditur in the regency and city of nortSumatra in starting year 2014-2017, to analyze whether the regional income for areal expenditure through balance funds is an intervening variable in the north Sumatra district and city governments in starting year 2014-2017. This study uses associate/quantitative methods with a systematic approach in answering the problem statement. The result of the research t hypothesis 1 show that the regional income towards area expenditure have a positive and significant, while the t test of hypothesis 2 shows that regional income and balance funds have a positive and significant effect on area expenditures with balance funds as intervening variables. The path analysis test result show a greater direct effect on regional expenditure variables.*

**Keywords :** *Regional Income, Balance Funds, and AreaExpenditure.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Melalui Dana Perimbangan Sebagai Variabel Intervening”**. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar sarjana Stara Satu (S-1) Program Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan S.E., M.M selaku rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu Dr. Surya Nita S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak Junawan S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu Rahima Br. Purba S.E., M.Si., AK, CA dan Bapak Junawan, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II yang telah memberikan masukan, saran serta arahan dalam penulisan dan perbaikan skripsi.
5. Pihak– pihak terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih atas banyaknya ilmu serta pelajaran yang bermanfaat dalam menambah pengalaman serta pemahaman penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta dapat menambah ilmu pengetahuan dan menjadi referensi kepada peneliti selanjutnya, Amin.

Medan, 30 September 2019

Elma Permata Sari BR.Pernangin  
NPM: 1515100402

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>

### **BAB I. PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Perumusan Masalah .....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
E. Keaslian Penelitian .....	8

### **BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**

A. Landasan Teori .....	9
1. Pendapatan Asli Daerah.....	9
2. Belanja Daerah.....	13
3. Dana Perimbangan .....	16
B. Penelitian Terdahulu .....	24
C. Kerangka Konseptual.....	25
D. Hipotesis .....	26

### **BAB III. METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan Penelitian .....	27
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	27
C. Populasi dan Sampel .....	28
D. Definisi Operasional Variabel .....	30
E. Teknik Pengumpulan Data.....	31
F. Teknik Analisis Data .....	31

## **BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	40
1. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	40
a. Sejarah Singkat Perkembangan Sumatera Utara .....	40
b. Perekonomian Sumatera Utara .....	42
c. Senidan Budaya .....	39
d. Visi dan Misi .....	41
2. Deskripsi Variabel Penelitian .....	45
3. Statistik Deskriptif .....	49
4. Pengujian Asumsi Klasik .....	50
5. Pengujian Regresi Linier Sederhana .....	54
6. Pengujian Analisis Jalur .....	54
7. Pengujian Hipotesis .....	58
B. Pembahasan .....	60
1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah .....	60
2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Melalui Dana Perimbangan Sebagai Variabel Intervening .....	61

## **BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Simpulan .....	63
B. Saran .....	64

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BIODATA**

### **LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1.1 Data Pendapatan Asli Daerah .....	3
Tabel 1.2 Data Belanja Daerah .....	4
Tabel 1.3 Data Dana Perimbangan .....	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	24
Tabel 3.1 Skedul Proses Penelitian .....	27
Tabel 3.2 Daftar Sampel Kabupaten/Kota .....	29
Tabel 3.3 Defenisi Operasional Variabel .....	30
Tabel 4.1 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara ....	46
Tabel 4.2 Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara .....	47
Tabel 4.3 Dana Perimbangan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.....	48
Tabel 4.4 Statistik Deskriptif .....	49
Tabel 4.5 Uji Multikolienaritas .....	52
Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi .....	53
Tabel 4.7 Koefisien (Hipotesis 1) .....	54
Tabel 4.8 Koefisien 1 (Hipotesis 2) .....	55
Tabel 4.9 Koefisies 2 (Hipotesis 2).....	55
Tabel 4.10 Model Summary (Regresi 1 Hipotesis 2).....	59
Tabel 4.11 Model Summary (Regresi 2 Hipotesis 2).....	59

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual .....	25
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas dengan P-Plot (Pendapatan Asli Daerah).....	50
Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas dengan P-Plot (Dana Perimbangan).....	51
Gambar 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Scatterplot.....	53

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penyelenggaraan urusan pemerintah menjadi kewenangan daerah yang mendanai atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah yang disusun secara tahunan yang telah ditetapkan oleh peraturan daerah. Dengan adanya otonomi daerah maka suatu daerah memiliki hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat. Pemerintah daerah juga dapat mengembangkan potensi daerah serta diberi kewenangan untuk mengeksplorasi sumber daya yang dimiliki baik secara efektif maupun efisien.

Derajat Desentralisasi merupakan aspek yang sangat penting dalam pelaksanaan otonomi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan lain-lain yang sah. Dengan meningkatkan pendapatan asli daerah masyarakat berharap adanya peningkatan pelayanan terutama di sektor publik seperti meningkatkan daya tarik investor untuk membuka usaha di daerah kabupaten/kota, sehingga pemerintah memberikan fasilitas pendukung investasi. Hal tersebut akan menarik investor untuk menanamkan modalnya dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat (36) “Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan”. Belanja daerah digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, meningkatkan belanja daerah merupakan salah satu tujuan untuk meningkatkan suatu

pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi guna mendorong pemerintah untuk melakukan pembangunan daerah yang direalisasikan dalam bentuk pengadaan fasilitas, infrastruktur dan sarana prasarana ditujukan untuk kepentingan publik. Dalam pembelanjaan daerah tidak lepas dari sumber penerimaan baik berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan pendapatan asli daerah.

Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari daerah yang bersumber dari ekonomi asli daerah yang dipungut dan berdasarkan undang-undang. Dengan adanya peningkatan pendapatan asli daerah masyarakat mengharapkan peningkatan pelayanan terutama di bidang sektor publik guna untuk memberikan fasilitas pendukung investasi. Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Menurut Sari *et al.*,(2014) “Dana perimbangan adalah modal yang berasal dari perolehan APBN yang diperuntukkan bagi daerah dalam upaya membiayai kepentingan daerah sebagai bentuk pengimplementasian asas desentralisasi”. Hubungan dalam bidang keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Pemerintah daerah dituntut untuk bisa lebih mandiri dalam mengelola penerimaan daerah agar tidak terjadi penyimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Dana APBN yang tidak terpakai di daerah tersebut akan dapat merugikan masyarakat dan pemerintah daerah. Agar dana yang di transfer tidak terbuang sia-sia maka setiap daerah harus lebih efektif dan efisien dalam mendanai

pengeluaran yang ada. Dimana klasifikasi pendapatan asli daerah, belanja daerah dan dana perimbangan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 Laporan Anggaran Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014-2017 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

No	Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017
1	Kab. Asahan	91.468.218.559	98.279.308.429	52.170.348.430	107.890.187.769
2	Kab. Deli Serdang	433.885.507.126	515.293.681.488	573.010.351.005	662.615.775.000
3	Kab. Karo	72.914.095.471	87.644.277.141	99.913.302.299	40.831.129.979
4	Kab. Labuhan Batu	109.896.912.458	101.023.216.259	125.925.267.724	163.989.690.295
5	Kab. Langkat	107.811.975.547	122.715.359.910	132.673.213.413	131.076.423.284
6	Kab. Mandailing Natal	37.965.692.368	63.847.458.130	70.405.901.828	100.111.769.563
7	Kab. Simalungun	96.390.208.715	111.893.282.770	132.560.800.826	213.789.585.400
8	Kab Tapanuli Selatan	95.588.202.103	109.349.451.811	76.640.675.841	81.435.846.816
9	Kab. Serdang Bedagai	74.762.406.401	80.141.929.203	108.062.776.483	102.479.860.648
10	Kab. Batu Bara	45.218.061.026	51.514.120.899	59.388.277.802	28.231.281.234
11	Kota Medan	1.384.246.114.730	1.489.723.189.089	1.535.309.574.015	1.973.780.338.563
12	Kota Binjai	71.967.137.635	78.327.792.811	97.339.497.584	98.283.092.444
13	Kota Pematang Siantar	90.477.498.257	95.557.865.286	101.582.731.955	116.508.915.582

Sumber : Diperoleh dari Kementerian Keuangan Sumatera Utara, 2019

Dari tabel diatas, dapat dilihat pendapatan asli daerah mengalami peningkatan dan penurun di Kabupaten/Kota. Pada Kabupaten Asahan tahun 2016 mengalami penurun sebesar Rp.52.170.348.430, namun di tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp.107.890.187.769. Kabupaten Karo mengalami penurunan di tahun 2017 sebesar Rp.40.831.129.979, tahun sebelumnya mengalami peningkatan. Kabupaten Langkat mengalami penurunan di tahun 2017 sebesar Rp.131.076.423.284. Kabupaten Tapanuli Selatan mengalami penurunan tahun 2016 sebesar Rp.76.640.675.841, namun di tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp.81.435.846.816. Kabupaten Serdang Bedagai mengalami penurunan sebesar Rp.102.479.860.648. Anggaran penerimaan pendapatan asli daerah terkecil di Kabupaten Batu Bara pada tahun 2017 sebesar Rp.28.231.281.234.

Tabel 1.2 Laporan Anggaran Realisasi Belanja Daerah Kabupaten/Kota  
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-201

No	Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017
1	Kab. Asahan	1.388.135.949.420	1.395.720.714.939	1.501.954.701.574	1.550.420.215.474
2	Kab. Deli Serdang	2.392.252.735.840	2.735.624.354.971	3.005.435.386.844	3.497.039.137.164
3	Kab. Karo	889.667.378.450	1.326.869.180.996	1.542.011.009.416	233.618.739.317
4	Kab. Labuhan Batu	915.110.451.097	1.019.728.251.640	1.194.338.054.774	1.357.678.632.932
5	Kab. Langkat	1.605.301.211.465	1.934.943.728.402	2.287.199.857.315	2.238.385.764.148
6	Kab. Mandailing Natal	972.738.850.695	1.245.111.632.560	1.459.576.624.438	1.563.819.372.565
7	Kab. Simalungun	1.648.278.603.129	1.824.943.465.853	2.185.034.609.508	2.304.907.688.629
8	Kab. Tapanuli Selatan	862.248.440.427	1.119.177.035.203	1.176.894.126.494	1.191.928.498.270
9	Kab. Serdang Bedagai	1.010.452.029.829	1.114.473.883.118	1.465.701.623.031	1.386.104.799.773
10	Kab. Batu Bara	791.504.676.902	903.322.939.973	1.128.446.893.922	1.063.041.449.881
11	Kota Medan	3.723.643.299.086	4.374.968.274.137	4.525.231.330.995	5.493.560.943.295
12	Kota Binjai	804.308.312.949	885.211.617.571	945.566.273.546	914.618.290.540
13	Kota Pematang Siantar	774.365.721.075	884.146.657.676	940.141.429.607	1.063.470.020.440

Sumber : Diperoleh dari Kementerian Keuangan, 2019

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat belanja daerah mengalami peningkatan dan penurunan di Kabupaten/Kota. Pada Kabupaten Karo mengalami penurunan tahun 2017 sebesar Rp.233.618.739.317, namun tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp.1.542.011.009.416. Kabupaten Serdang Bedagai mengalami peningkatan tahun 2016 sebesar Rp.1.465.701.623.031, tetapi di tahun 2017 mengalami penurunan sebesar Rp.1.386.104.799.773. Kabupaten Batu Bara mengalami peningkatan tahun 2016 sebesar Rp.1.128.446.893.922, tetapi di tahun 2017 mengalami penurunan sebesar Rp.1.063.041.449.881. sedangkan untuk kota yang mengalami penurunan yaitu Kota Binjai tahun 2017 sebesar Rp.914.618.290.540.

Tabel 1.3 Laporan Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan Kabupaten/Kota  
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2017

No	Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017
1	Kab. Asahan	918.597.777.626	965.041.336.384	1.188.340.367.058	1.398.059.730.290
2	Kab. Deli Serdang	1.524.671.888.347	1.565.271.496.813	1.974.004.465.463	2.174.505.511.040
3	Kab. Karo	761.711.483.878	850.087.455.305	1.040.055.892.716	510.679.967.722
4	Kab. Labuhan Batu	641.297.033.851	707.284.674.013	1.005.470.238.990	956.517.837.000
5	Kab. Langkat	1.260.298.417.984	1.390.565.543.763	1.732.717.434.638	1.868.902.371.908
6	Kab. Mandailing Natal	805.812.253.841	856.846.422.230	1.055.984.803.941	1.086.204.333.000
7	Kab. Simalungun	1.225.270.110.745	1.247.469.763.643	1.618.580.654.169	1.787.150.548.692
8	Kab. Tapanuli Selatan	679.283.446.041	749.637.195.743	942.141.001.304	860.325.451.870
9	Kab. Serdang Bedagai	810.807.637.654	867.189.090.713	1.077.784.187.979	1.063.448.145.000
10	Kab. Batu Bara	668.851.405.909	665.570.072.713	864.938.764.513	846.733.744.588
11	Kota Medan	1.598.113.512.931	1.355.644.466.363	1.900.853.852.448	2.236.515.051.000
12	Kota Binjai	585.699.016.088	604.168.845.881	747.927.480.220	719.167.216.158
13	Kota Pematang Siantar	579.535.032.088	609.312.359.513	756.797.369.354	766.128.238.000

Sumber : Diperoleh dari Kementerian Keuangan, 2019

Berdasarkan tabel diatas, dana perimbangan mengalami penurunan dan peningkatan dalam kurun 4 tahun di 13 Kabupaten/Kota. Pada tahun 2017 dana perimbangan mengalami penurunan di 5 Kabupaten dan 1 Kota yakni Kabupaten Karo sebesar Rp.510.679.967.722, Kabupaten Labuhan Batu sebesar Rp.956.517.837.000, Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar Rp.860.325.451.870, Kabupaten Serdang Bedagai sebesar Rp.1.063.448.145.000, Kabupaten Batu Bara sebesar Rp.846.733.744.588, dan Kota Binjai sebesar Rp.719.167.216.158. Penurunan dana perimbangan akan membuat suatu daerah tidak berkegantungan terhadap pemerintah pusat.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang : **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah melalui Dana Perimbangan Sebagai Variabel Intervening Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara”**.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Adapun identifikasi masalah yang akan penulis bahas yakni :

- a) Terjadinya penurunan pendapatan asli daerah tahun 2017 di Kabupaten Batu Bara sebesar Rp.28.231.281.234. Hal ini akan berdampak pada pendapatan di daerah tersebut, dengan menurunnya pendapatan asli daerah maka Kabupaten Batu Bara tidak dapat membiayai daerahnya sendiri.
- b) Terjadinya penurunan belanja daerah tahun 2017 di Kabupaten Karo sebesar Rp.233.618.739.317. Hal ini akan berdampak pada kegiatan yang dilakukan akan terhambat dan mengurangi aset daerah tersebut.
- c) Terjadinya penurunan dana perimbangan tahun 2017 di Kabupaten Karo sebesar Rp.510.679.967.722. Dengan penurunan dana perimbangan akan mengakibatkan Kabupaten Karo mandiri dalam membiayai daerahnya, misalnya dalam infrastruktur daerah Karo yang sudah memenuhi.

### **2. Batasan Masalah**

Mengingat masalah yang akan dihadapi agar tidak menyimpang maka penulis hanya membatasi pada Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Melalui Dana Perimbangan Sebagai Variabel Intervening Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun 2014-2017.



### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah maka penulis memiliki rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah ada pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah?
2. Apakah ada pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah melalui dana perimbangan sebagai variabel intervening?

### **D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang masalah penelitian ini memiliki tujuan :

- a) Untuk menganalisis apakah pendapatan asli daerah berpengaruh langsung terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.
- b) Untuk menganalisis apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja daerah melalui dana perimbangan sebagai variabel intervening pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.

#### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Bagi Peneliti : Menambah wawasan dan pengetahuan dalam menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah melalui dana perimbangan sebagai variabel intervening.
- b. Bagi Akademik : Dapat memberikan referensi bagi peneliti selanjutnya terutama pada penelitian akuntansi yang sejenis di sektor publik.
- c. Bagi Pemerintah Daerah : Penelitian ini diharapkan jadi masukan untuk mendukung pengambilan keputusan dan kebijakan yang mengutamakan kepentingan publik.

## **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Masayu Rahma Wati (2017) dengan waktu, objek dan model variabel yang digunakan berbeda. Maka penelitian ini berusaha ingin mengetahui hubungan langsung dan atau melihat hubungan dari intervening, dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Melalui Dana Perimbangan Sebagai Variabel Intervening Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Perbedaan dan persamaan penelitian terletak pada:

1. Variabel Penelitian : Penelitian terdahulu menggunakan 2 (dua) variabel bebas (Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan) serta 1 (satu) variabel terikat yaitu Belanja Daerah. Sedangkan penelitian ini menggunakan 1 variabel bebas yaitu Pendapatan Asli Daerah dan 1 variabel terikat yaitu Belanja Daerah serta 1 variabel intervening yaitu Dana Perimbangan.
2. Jumlah Data : Penelitian terdahulu menggunakan sampel 1 kota dan data tahun 2004-2015. Sedangkan penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 13 Kabupaten/Kota dan data tahun 2014-2017.
3. Waktu Penelitian : Penelitian terdahulu dilakukan tahun 2017, sedangkan penelitian ini tahun 2019.
4. Lokasi Penelitian : Penelitian terdahulu dilakukan pada Kota Bandung, sedangkan penelitian ini dilakukan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

###### **a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai dana perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa “Pendapatan Asli Daerah ialah pendapatan yang di peroleh suatu daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terdapat pada pasal 3 disebutkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki tujuan yaitu memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi yang ada pada daerah sebagai perwujudan desentralisasi”.

Menurut Budi S Purnomo (2009:34) “Pendapatan asli daerah bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah”. Pendapatannya di daerah memiliki tujuan untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah. Peningkatan pendapatan asli daerah akan meningkatkan pendapatan suatu daerah dengan tujuan untuk mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat.

###### **b. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah**

Sumber sumber pendapatan asli daerah yang akan meningkatkan pendapatan daerah sebagai berikut:

###### **1. Pajak Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai “Pajak daerah dan retribusi daerah ialah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

Undang-undang yang berlaku dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan daerah dengan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Besarnya tarif Pajak Daerah yang telah ditetapkan melalui peraturan daerah Pajak Daerah dibagi menjadi dua jenis yaitu:

1) Pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri dari:

- a) Pajak Kendaraan Bermotor
- b) Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d) ImaksuPajak Roko

2) Jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh Kabupaten /Kota yaitu:

- a) Pajak Restoran
- b) Pajak Hotel
- c) Pajak Rekleme
- d) Pajak Penerangan Jalan
- e) Pajak Parkir
- f) Pajak Sarang Burung Walet
- g) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- h) Pajak Prolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

## **2. Retribusi Daerah**

Retribusi daerah juga memiliki peranan yang cukup besar dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Retribusi daerah merupakan jenis penerimaan daerah yang dipungut pemerintah kepada masyarakat untuk kenyamanan yang bersifat memaksa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 “Retribusi daerah adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran

atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khususnya disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Adapun retribusi daerah dibagi menjadi tiga yaitu:

a) **Retribusi Jasa Umum**

Retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan yang diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan manfaatnya bersifat umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

b) **Retribusi Jasa Usaha**

Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial.

c) **Retribusi Perizinan Tertentu**

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi yang dikutip pemerintah daerah oleh orang pribadi atau badan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan SDA, barang, prasarana dan fasilitas tertentu guna untuk melindungi kepentingan umum serta menjaga kelestarian lingkungan.

### **3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang dipisahkan**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan “Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan antara lain bagian laba dari BUMD dan hasil kerjasama dengan pihak ketiga”. Jenis-jenis Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yaitu:

a) **Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah**

b) **Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank**

c) **Bagian Laba Lembaga Keuangan Non Bank**

d) Bagian Laba Pernetanaan Modal atau Investasi

#### **4. Lain –lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah**

Lain –lain pendapatan yang sah merupakan pendapatan lain-lain penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain pemerintah daerah. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan tentang “Pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan”. Jenis- jenis pendapatannya meliputi objek pendapatan sebagaiberikut:

- a) Hasil Penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
- b) Jasa giro
- c) Pendapatan bunga
- d) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
- e) Penerimaan komisi, potongan bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang dan jasa oleh daerah
- f) Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- g) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- h) Pendapatan denda pajak
- i) Pendapatan denda retribusi
- j) Pendapatan dari pengembalian
- k) Fasilitas umum dan fasilitas sosial
- l) Pendapatan dan pengadaan pendidikan serta pelatihan
- m) Pendapatan asuransi

## 2. Belanja Daerah

Berdasarkan PSAP 02 Tahun 2010 “Belanja daerah merupakan pengeluaran dari semua rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah daerah”. Sedangkan menurut Priyo (2009:4) “Belanja daerah ialah fungsi dari penerimaan daerah”. Belanja merupakan variabel terikat yang besarnya akan sangat bergantung pada sumber pembiayaan daerah baik yang berasal dari penerimaan sendiri maupun yang berasal dari transfer pusat.

Belanja daerah berdasarkan dari pengeluaran pemerintah daerah berperan dalam mempertemukan permintaan masyarakat dengan menyediakan sarana dan prasarana yang tidak dipenuhi oleh perusahaan swasta. Belanja diklasifikasikan sesuai dengan jenis belanja untuk pelaksanaan suatu aktifitas. Klasifikasi belanja diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah untuk tujuan pelaporan keuangan menjadi:

### a. “Belanja Operasi

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat dan daerah yang memberi manfaat jangka pendek meliputi belanja pegawai, belanja barang, subsidi, hibah dan bantuan sosial.

### b. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap yang wujudnya memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nilai aset tetap dalam belanja modal sebesar harga belibangunan ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan pembangunan aset yang digunakan. Belanja modal meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal lampu, jalan dan irigasi, belanja modal aset tetap lainnya, belanja modal aset tetap lainnya.

### c. Belanja Lain-lain/Belanja Tidak Terduga

Belanja lain-lain atau belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran yang bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan berulang-ulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial serta pengeluaran tidak terduga lainnya yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat dan daerah.

#### d. Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran anggaran dari entitas pelaporan yang lebih tinggi ke entitas pelaporan yang lebih rendah seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah provinsi ke kabupaten/kota serta dana bagi hasil dari kabupaten/kota ke desa”.

Belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang “Belanja dikelompokkan menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung”. Adapun pengelompokan jenis kedua belanja sebagai berikut:

##### 1. Belanja Langsung

Belanja transfer adalah belanja yang terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. Belanja Langsung terdiri dari belanja:

1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang dan Jasa
3. Belanja Modal

##### 2. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan dan program. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

1. Belanja pegawai
2. Belanja bunga
3. Belanja subsidi
4. Belanja hibah
5. Belanja bantuan sosial



6. Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa.

Belanja Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Menyebutkan bahwa “Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan penanganannya dalam bagian dan bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan”. Penerimaan daerah yang diperoleh baik dari pendapatan asli daerah maupun dari dana perimbangan tentunya digunakan pemerintah daerah untuk membiayai belanja daerah.

Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Departemen RI mengungkapkan bahwa “Pemerintahan daerah memiliki peranan penting dalam pemberian pelayanan publik”. Hal ini didasarkan pada asumsi permintaan terhadap pelayanan publik dapat berbeda-beda antar daerah. Sementara itu Pemerintah Daerah juga memiliki yang paling dekat dengan publik untuk mengetahui dan mengatasi perbedaan-perbedaan dalam permintaan kebutuhan pelayanan publik. Hal yang paling penting bagaimana memutuskan untuk mendelegasikan tanggung jawab pelayanan publik atau fungsi belanja pada berbagai tingkat pemerintahan untuk bisa mendanai pengeluaran yang besar menjadi pengeluaran yang kecil.

Secara teori, terdapat dua pendekatan yang berbeda dalam fungsi belanja yaitu pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan. Menurut pendekatan pengeluaran kewenangan sebagai tanggung jawab antar tingkat pemerintahan

dirancang dengan baik agar tidak terjadi timpang tindih. Pendelegasian ditentukan berdasarkan kriteria yang bersifat obyektif seperti tingkat lokasi dampak dari fungsi tertentu, pertimbangan keseragaman kebijakan dan penyelenggaraan, kemampuan teknik dan manajerial pada umumnya. Pertimbangan faktor-faktor luar yang berkaitan dengan kewilayahan, efisiensi, dan skala ekonomi. Sedangkan menurut sekala pendapatan merupakan sumber pendapatan publik yang dialokasikan antar berbagai tingkat pemerintah yang hasil dari tawar – menawar politik. Pertukaran politik sangat mempengaruhi oleh pengalokasian sumber dana antar tingkat pemerintahan, meskipun pertimbangan prinsip diatas relevan kemampuan daerah menjadi pertimbangan yang utama.

### **3. Dana Perimbangan**

Menurut Sari et.al (2014) “Dana perimbangan adalah dana modal yang berasal dari perolehan APBN yang diperuntukan bagi daerah dalam upaya membiayai kepentingan daerah sebagai bentuk pengimplestasian asas desentralisasi”. Nasution (2015) dalam Rahmawati (2017) menjelaskan “Dana transfer/bantuan pemerintah daerah merupakan sumber pendapatan yang berasal dari anggaran untuk mendukung pelaksanaan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah terutama dilakukan dengan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik”.

Dapat disimpulkan bahwa dana perimbangan merupakan pendapatan yang diperoleh dari pemerintah pusat guna untuk membiayai pengeluaran daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi. “Sumber-sumber dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil bukan pajak dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus” (Aprizay dkk, 2014).

### a. Dana Bagi Hasil

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan “Dana yang bersumber dari APBN yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah”. DBH dilakukan berdasarkan prinsip daerah penghasil yang dibagikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu. Penerimaan negara yang dihasilkan terdiri atas:

1. Penerimaan Pajak PPh Orang Pribadi adalah Penerimaan Negara dari PPh WPOPDN dan PPh pasal 21 dibagikan kepada daerah sebesar 20% dengan rincian sebagai berikut:
  - a) 8% dari Provinsi yang bersangkutan.
  - b) 12% untuk kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.
2. Cukai hasil tembakau Penerimaan Negara dibagikan kepada daerah sebesar 2% dengan rincian sebagai berikut :
  - a) 0.6% untuk provinsi yang bersangkutan.
  - b) 0.8% untuk kabupaten /kota dalam provinsi yang bersangkutan.
  - c) 0.6% untuk pemerataan kabupaten /kota lainnya.
3. Penerimaan Bukan Pajak
  - a) Sektor Kehutanan
 

Dana Bagi Hasil sektor kehutanan terdiri atas :

    - 1) Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH);
    - 2) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
    - 3) Dana Reboisasi Bagian daerah dari penerimaan negara iuran hak perusahaan hutan dibagi dengan perincian :

- (a) 16% untuk daerah provinsi yang bersangkutan
  - (b) 64% untuk daerah kabupaten/kota penghasil
- 4) Bagian Dari penerimaan negara provisi sumber daya hutan dibagi dengan perincian :
- (a) 16% untuk daerah provinsi yang bersangkutan .
  - (b) 32% untuk daerah kabupaten/kota penghasil
  - (c) 32% untuk daerah kabupaten/kota dibagiakan dengan porsi yang sama besar untuk semua kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan. Bagian dari dari penerimaan yang berasal dari dana reboisasi sebesar 40% dibagi kepada kabupaten/kota penghasil untuk medanai kegiatan rehabilitas hutan dan lahan.

b) Sektor Pertambangan Umum

Dana Bagi Hasil sektor pertambangan umum terdiri atas:

- 1) Penerimaan Iuran tetap (*land-rent*), adalah seluruh penerimaan iuranyang diterima negara sebagai imbalan atas keempatan umum, eksplorasi, dan eksploitasi pada suatu wilayah kuasa pertamabangan
- 2) Penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (*royalty*), adalah iuran produksi yang diterima negara dalam hal pemegang kuasa pertambangan eksplorasi mendapat hasil berupa bahan galian yang tergali atas kesempatan eksplorasi yang diberikan kepadanya serta atas hasil yang diperoleh dari usaha pertambangan eksploitasi (*Royalty*) satu atau lebih bahan galian.

Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum dari iuran Tetap sebesar 80% yang berasal dari wilayah kabupaten/kota dibagi dengan rincian:

- (a) 16% untuk provinsi yang bersangkutan
- (b) 32% untuk daerah kabupaten /kota penghasil
- (c) 32% untuk daerah kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan .

### 3) Sektor Perikanan

Dana Bagi Hasil sektor perikanan berasal dari pungutan perusahaan perikanan dan pungutan hasil perikanan. Bagian daerah dari Dana Bagi Hasil sektor perikanan sebesar 80% dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota .

### 4) Sektor Pertambangan Minyak Bumi

Penerimaan negara dari pertambangan minyak bumi dibagi sebagai berikut. Daerah perimbangan 85% untuk pemerintah pusat dan 15% untuk daerah. Bagian daerah dibagi dengan rincian.

- (a) 3% dibagi untuk provinsi yang bersangkutan.
- (b) 6% dibagi untuk kabupaten/kota penghasil.
- (c) 6% dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi bersangkutan.

DBH Pertambangan Minyak Bumi yang dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi bersangkutan dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota lainnya.

5) Penerimaan negara dari pertambangan gas bumi dibagi menjadi Daerah imbalan 70% untuk pemerintah pusat dan 30% untuk daerah. Bagian daerah dibagi dengan rincian sebagai berikut:

- (a) 6% dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan.
- (b) 12% dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil.
- (c) 12% dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi bersangkutan.
- (d) DBH Pertambangan Gas Bumi yang dibagikan untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

6) Sektor Pertambangan Panas Bumi

Dana Bagi Hasil sektor pertambangan panas bumi berasal dari setoran bagian pemerintah atau iuran tetap dan iuran produksi. Bagian penerimaan daerah untuk sektor pertambangan panas bumi sebesar 80% sebagai berikut:

- (a) 16% untuk provinsi yang bersangkutan, dan
- (b) 32% untuk kabupaten/kota penghasil
- (c) 32% untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan, yang dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

### **b. Dana Alokasi Umum**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang “Dana alokasi umum adalah dana yang berasal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto dan ditetapkan dalam APBN. Provisi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota.

“Dana Alokasi Umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah” (Djaenuri, 2012:103). Termasuk dalam pengertian tersebut jaminan kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan diseluruh daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat merupakan satu kesatuan dengan penerimaan umum APBD. Tujuan penting alokasi DAU yaitu dalam kerangka pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik antar pemerintah daerah di Indonesia.

Penggunaan dana alokasi umum ditetapkan oleh daerah dalam APBD harus tetap pencapaian tujuan pemberian otonomi kepada daerah yaitu dengan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik seperti pelayanan dibidang kesehatan dan pendidikan.

### **c. Dana Alokasi Khusus**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang “Dana Alokasi Khusus merupakan dana perimbangan yang bersumber dari APBN yang

diberikan kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus ditetapkan setiap tahun dalam APBN”. Persyaratan untuk memperoleh dana alokasi khusus adalah sebagai berikut:

1. Daerah perlu membuktikan bahwa daerah kurang mampu membiayai seluruh pengeluaran usulan kegiatan dari PAD, Bagi Hasil Pajak dan SDA, DAU, Pinjaman Daerah dan Lain-lain Penerimaan Yang Sah.
2. Daerah menyediakan dana pendamping sekurang-kurangnya 10% dari kegiatan yang diajukan (dikecualikan untuk dana alokasi khusus dari dana reboisasi).
3. Kegiatan tersebut memenuhi kriteria teknis sektor/kegiatan ditetapkan oleh menteri dan instansi yang terkait.

Kriteria pengalokasian dana alokasi khusus meliputi:

#### 1. Kriteria Umum

Berdasarkan Pasal 40 UU Nomor 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa “Alokasi dana alokasi khusus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam APBD”. Kriteria umum dihitung untuk melihat kemampuan APBD membiayai kebutuhan-kebutuhan dalam rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi belanja pegawai.

#### 2. Kriteria Khusus

Ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah. Karakteristik daerah yang meliputi untuk provinsi yaitu daerah tertinggal, daerah pesisir atau kepulauan,



daerah perbatasan dengan negara lain, daerah rawan bencana. sedangkan untuk kabupaten/kota yaitu daerah tertinggal, daerah rawan bencana daerah ketahanan pangan dan daerah pariwisata.

### 3. Kriteria Teknis

Kriteria teknis dirumuskan oleh Kementerian Negara atau Departemen teknis terkait yang dicerminkan dengan indikator-indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi sarana perasarana masing-masing bidang dan kegiatan yang akan didanai oleh dana alokasi khusus. Kriteria teknik berdasarkan lingkup kegiatan yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup prasarana pemerintahan, keluarga berencana, kehutanan perdagangan, perumahan dan pemukiman, listrik pedesaan, sarana kawasan, transportasi pedesaan keselamatan transportasi.

## B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang menjadi referensi di penelitian ini adalah sebagai berikut:

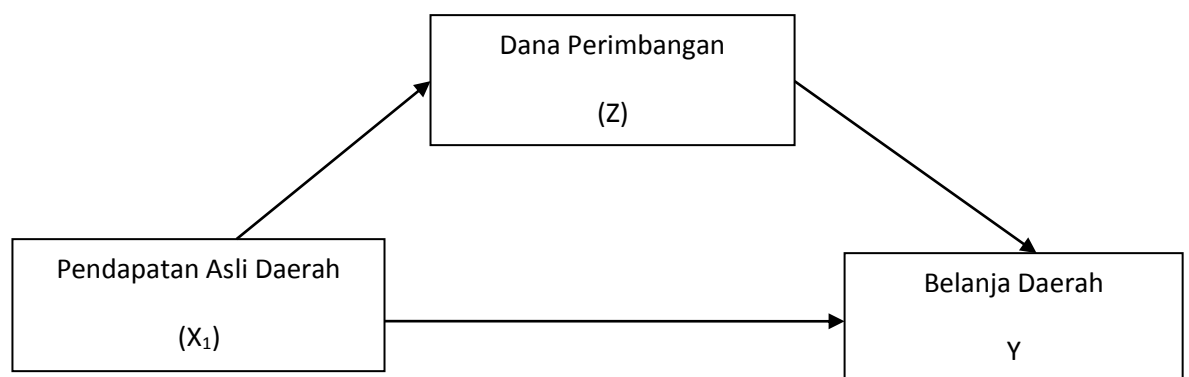
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama /Tahun	Judul	Variabel X	Variabel Y	Variabel Z	Model Analisis
1.	I Putu Irawan (2016) Universitas Udayana Bali	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening	Pendapatan asli Daerah (PAD)	Dana Perimbangan	Belanja Modal	Hasil menunjukkan pendapatan asli daerah dan keseimbangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Pendapatan asli daerah dan keseimbangan memiliki pengaruh langsung positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi namun belanja modal memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
2.	Masayu Rahma Wati (2017) Universitas Bina Sarana Informatika	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung	X <sub>1</sub> Pendapatan Asli Daerah X <sub>2</sub> Dana Perimbangan	Belanja Daerah		Hasil analisis korelasi menunjukkan hubungan pendapatan asli daerah dengan belanja daerah dengan kategori sangat kuat dan hubungan danaperimbangan dengan belanja daerah dengan kategori sangat kuat. Hasil analisis parsial menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan variabel pendapatan asli daerah danaperimbangan terhadap belanja daerah. Hasil uji hipotesis simultan menunjukkan terdapat pengaruh signifikan antara pendapatan asli daerah danaperimbangan terhadap belanja daerah.
3.	Hendri Edison H. Panggabean (2009) Universitas Sumatera Utara	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Toba Samosir	X <sub>1</sub> Pendapatan Asli Daerah	Belanja Daerah		Hasil penelitian membuktikan bahwa pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah secara parsial maupun simultan, yang dinyatakan dalam koefisien determinasi sebesar 78,5% artinya belanja daerah dapat dijelaskan oleh pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar 78,5% sedangkan sisanya 21,5% dipengaruhi oleh variabel lain.
4.	Fani Wiraswasta (2018) Universitas	Pengaruh Perimbangan Pendapatan Asli Daerah	X <sub>1</sub> Dana Perimbangan X <sub>2</sub> Pendapatan	Belanja Modal		Penelitian ini menemukan bahwa semua hipotesis terbukti secara positif dan signifikan. Dana perimbangan dan pendapatan asli

	Brawijaya	(PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal Dikota Dalam wilayah Jawa Timur	Asli Daerah			daerah mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan secara langsung terhadap belanja modal dan pertumbuhan ekonomi atau tidak langsung melalui mediasi belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi.
5.	Daud wido Immanuel Panggabean (2017)	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung Tahun 2011-2015	X1 Pendapatan Asli Daerah X2 Dana Perimbangan	Pertumbuhan Ekonomi		Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel PAD, DBH dan DAU berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu variabel DAK tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung.

### C. Kerangka Konseptual

Berdasarkan teori yang telah diuraikan sebelumnya maka konsep untuk menjelaskan dan menunjukan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti adalah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Kerangka Konseptual penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

#### **D. Hipotesis**

Menurut Rusiadi (2014:75) menyatakan bahwa “Hipotesis merupakan jawaban sementara yang hendak diuji kebenarannya dengan melihat hasil analisis”. Atas dasar konseptual diatas penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah.
2. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah melalui Dana Perimbangan Sebagai Variabel Intervening.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan asosiatif/kuantitatif. Menurut Rusiadi (2014:12) “Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih”. Variabel independen dari penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah, sedangkan variabel dependen dari penelitian ini adalah Belanja Daerah serta variabel *intervening* dalam penelitian ini adalah Dana Perimbangan.

#### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

##### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan adalah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara dari website [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id).

##### 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai dari bulan juli 2019 sampai dengan selesai, dengan format sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skedul Penelitian

No	Aktivitas	Bulan,														
		Juli, 2019			Agustus, 2019			September, 2019			Oktober, 2019			November, 2019		
1	Penyusunan Judul	■														
2	Penyusunan Proposal		■	■	■											
3	Seminar Proposal				■	■										
4	Perbaikan Acc Proposal					■	■	■								
5	Pengolahan Data							■	■	■	■	■				
6	Penyusunan Skripsi									■	■	■	■			
7	Bimbingan Skripsi												■	■		
8	Sidang Meja Hijau														■	■

Sumber : Diolah Penulis, 2019

### C. Populasi dan Sampel/Jenis dan Sumber Data

#### 1. Populasi

Menurut Rusiadi (2014:30) “Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara untuk periode 2014 sampai dengan 2017.

#### 2. Sampel

Menurut Rusiadi (2014:31) “Sampel merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Teknik pengambilan sampel yaitu *purposive sampling* yang artinya teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu sesuai dengan karakteristik/ kriteria yang ditentukan. Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi, adapun kriteria/karakteristik dalam penelitian ini yaitu:

- a) Jumlah penerimaan pendapatan asli daerah yang tinggi di Kabupaten/Kota pada tahun 2014-2017.
- b) Jumlah pembiayaan belanja daerah yang tinggi di Kabupaten/Kota pada tahun 2014-2017.

Adapun dari populasi sebanyak 33 Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria sampel sebanyak 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dalam penelitian ini. Maka yang dijadikan sampel yakni:

Tabel 3.2 Daftar Sampel Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

No	Kabupaten/Kota
1	Kabupaten Asahan
2	Kabupaten Deli serdang
3	Kabupaten Karo
4	Kabupaten Labuhan Batu
5	Kabupaten Langkat
6	Kabupaten Mandailing Natal
7	Kabuapten Simalungun
8	Kabupaten Tapanuli Selatan
9	Kabupaten Serdang Bedagai
10	Kabupaten Batu Bara
11	Kota Medan
12	Kota Binjai
13	Kota Pematang Siantar

Sumber : Diolah Penulis, 2019

### 3. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa angka , pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera.

### 4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder.Data sekunder merupakan data yang mengacu pada informasi yang telah di sajikan.Data sekunder dapat dilihat dari website [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id) laporan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, mulai periode penelitian tahun 2014-2017.

## D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

### 1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, dengan demikian variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Variabel Independen

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Adapun variabel independen yang terdapat dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah.

b. Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi karena adanya variabel bebas. Adapun variabel dependen yang terdapat dalam penelitian ini adalah Belanja Daerah.

c. Variabel *Intervening*

Variabel *intervening* merupakan variabel yang menjadikan hubungan tidak langsung antara hubungan variabel independen dengan variabel dependen. Adapun variabel *intervening* dalam penelitian ini adalah Dana Perimbangan.

## 2. Definisi Operasional

Tabel 3.3 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Pendapatan Asli daerah (X)	Pendapatan yang diperoleh oleh daerah tersebut dari sumber daya yang dimilikinya sendiri. (UU No.23 Tahun 2014)	Pendapatan asli daerah terdiri atas 4 komponen yakni: 1. Pajak Daerah 2. Retribusi Daerah 3. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan 4. Lain-lain PAD yang sah	Rasio
Belanja Daerah (Y)	Semua pengeluaran dari semua rekening kasumum daerah yang mengurangi ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah daerah. (PSAP 02 Tahun 2010)	Belanja Daerah terdiri 4 komponen yakni : 1. Belanja Operasi 2. Belanja Modal 3. Belanja Lain-lain/Tak Terduga 4. Belanja Transfer	Rasio
Dana Perimbangan (Z)	Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. (UU No.33 Tahun 2004)	Dana Perimbangan terdiri 4 komponen yakni: 1. DAU 2. DAK 3. Dana Bagi Hasil	Rasio

Sumber: Diolah Penulis, 2019



## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara dokumentasi dari website [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id) dapat dikumpulkan serta diolah dari informasi terdahulu yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

## **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan regresi linier sederhana dan analisis jalur. Uji regresi linier sederhana adalah teknik statistik yang digunakan untuk meramalkan bagaimana pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Sedangkan uji analisis jalur merupakan bentuk umum dari uji regresi linier sederhana.

### **1. Statistik Deskriptif**

Menurut Ghozali (2018:19) “Statistik deskriptif emberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi). Untuk memberikan gambaran analisis statisti deskriptif maka akan di analisis variabelnya.

### **2. Uji Asumsi Klasik**

Penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik sebelum melakukan pengujian hipotesis. Metode analisis digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis jalur yang dapat digunakan untuk penelitian mengenai pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dengan adanya variabel *intervening*. Dalam metode ini uji asumsi klasik terbagi atas:

a. Uji Normalitas Data

Uji normalitas dilakukan untuk menguji model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya akan memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik mempunyai distribusi data normal atau mendekati normal. Cara mendeteksi normalitas dengan melihat penyebaran data atau titik pada sumbu diagonal dari grafik. Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut :

- 1) Jika titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.
- 2) Jika titik menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk menunjukkan adanya hubungan linier antara variabel bebas dalam model regresi maupun untuk menunjukkan ada tidaknya derajat kolinieritas yang tinggi antara variabel-variabel bebas. Jika antar variabel berkorelasi dengan sempurna maka disebut dengan multikolinieritas sempurna (*perfect multicollinearity*), berarti model kuadrat terkecil tersebut tidak bisa digunakan. Multikolinieritas dapat diketahui dengan menganalisis nilai toleransi serta *Variance Inflation Factor* (VIF). Suatu variabel dapat dikatakan terbebas dari asumsi multikolinieritas apabila nilai  $VIF > 10$  (Ghozali, 2018).

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji model regresi linier yang terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Menurut Ghozali (2018:112) terjadi autokorelasi jika *durbin watson* sebesar  $< 1$  dan  $> 4$ . Secara umum kriteria yang digunakan adalah:

- 1) Jika  $DU < DW < 4-DU$  maka  $H_0$  ditolak, artinya tidak terjadi autokorelasi
- 2) Jika  $DW < DL$  maka  $H_0$  diterima, artinya terjadi autokorelasi
- 3) Jika  $4-DU < DW < 4-DL$ , artinya tidak ada kepastian atau kesimpulan yang pasti.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan pengujian yang dilakukan untuk melihat adanya heteroskedastisitas dengan melihat grafik plot antar nilai prediksi variabel terikat dengan residual. Deteksi dapat dilakukan dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot yang sudah diperidksi. Dengan analisis dasar sebagai berikut:

- 1) Jika ada titik-titik membentuk pola dan teratur, maka dapat mengindikasikan terjadinya heteroskedastisitas.
- 2) Jika pola tidak terlihat jelas dan titik menyebar diatas dan dibawah nol, maka hal tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas.

### 3. Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi bertujuan untuk memperkirakan atau meramalkan nilai satu variabel dalam hubungannya dengan variabel yang lain diketahui melalui

persamaan garis regresi. Sedangkan regresi linier berganda merupakan dimana regresi variabel terikatnya dihubungkan dengan satu variabel bebas menunjukkan diagram hubungan yang benar.

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana. Rumus analisis regresi sederhana adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + bX + e$$

Keterangan:

Y = Belanja Daerah

$\alpha$  = Konstanta

b = Koefisien Regresi Sederhana

X = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

e = *Error*

#### 4. Uji Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji analisis jalur (*Path Analysis*). Analisis jalur merupakan salah satu bentuk umum dari uji linier sederhana, analisis ini digunakan untuk menguji hubungan sebab akibat yang terjadi pada regresi linier sederhana antara variabel bebas dengan variabel terikat baik secara langsung maupun secara tidak langsung terdapat variabel *intervening*. Hasil analisis terlihat pada hasil yang berada dalam tabel koefisien, adapun persamaan analisis jalur yang digunakan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X + b_2Z + e$$

Keterangan:

Y = Belanja Daerah

a = Konstanta

X = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Z = Dana Perimbangan

e = *Error*

Untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung, maka diperlukan untuk menghitung nilai t dari koefisien **ab** dengan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{ab}{sab}$$

Nilai t hitung dibandingkan dengan nilai t tabel, jika nilai t hitung > nilai t tabel maka dapat disimpulkan terjadi pengaruh mediasi. Asumsi uji Sobel memerlukan jumlah sampel yang besar apabila jumlah sampel kecil maka uji sobel kurang konservatif.

## 5. Uji Hipotesis

### a. Uji Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk menguji hipotesis secara parsial berfungsi untuk menunjukkan pengaruh tiap variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui diterima atau tidaknya hipotesis yang diajukan maka perlu dilakukan uji t. Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini secara parsial yaitu pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah.

$H_0 : \beta_1 = 0$ , artinya tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

$H_a : \beta_1 \neq 0$ , artinya terdapat pengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

Kriteria pengambilan keputusan adalah:

$H_0$  ditolak jika *signifikant* < 0,05

$H_0$  diterima jika *signifikan* t > 0,05

b. Uji Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi merupakan suatu bilangan yang dinyatakan dalam persen (%) dan diperoleh dari bentuk kuadrat koefisien korelasi yang menunjukkan besarnya pengaruh yang diberikan oleh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Koefisien determinasi dapat dilihat dengan semakin tingginya  $R^2$  yang disesuaikan semakin baik bagi model regresi. Nilai koefisien bervariasi mulai dari 0 sampai 1, jika hasil mendekati 0 artinya kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel sangat terbatas. Tapi jika hasil mendekati 1 maka artinya variabel-variabel bebas memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel terikat.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Sejarah Profi Perkembangan Provinsi Sumatera Utara**

Di bagian barat Indonesia Provinsi Sumatera Utara berada terletak pada garis 1°-4° Lintang Utara dan 98°-100° Bujur Timur, Provinsi Sumatera Utara memiliki Luas daratan sebesar 72.981,23 km<sup>2</sup>. Sumatera Utara pada dasarnya dibagi menjadi Pesisir Timur, Pegunungan Bukit Barisan, Pesisir Barat dan Kepulauan Nias.

Sebelah Utara perbatasan dengan Provinsi Aceh dan Selat Malaka. Sebelah Selatan perbatasan dengan Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Barat, dan Samudera Indonesia. Sebelah Barat perbatasan dengan Provinsi Aceh dan Samudera Indonesia, sedangkan sebelah Timur perbatasan dengan Selat Malaka.

Pada era Pemerintahan Belanda, Sumatera Utara merupakan suatu Pemerintahan Gouvernement Van Sumatera dengan wilayah meliputi seluruh Pulau Sumatera dan dipimpin oleh Gubernur yang berkedudukan di Kota Medan. Setelah kemerdekaan dalam sidang pertama Komite Nasional Daerah, Provinsi Sumatera dibagi menjadi tiga bagian yaitu Sumatera Utara, Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Utara merupakan penggabungan dari tiga daerah administratif yang disebut Keresidenan Aceh, Keresidenan Sumatera Timur dan Keresidenan Tapanuli.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1948 pada tanggal 15 April Tahun 1948 tentang Sumatera yang akan

dibagi menjadi tiga provinsi dimana masing-masing punya hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Selanjutnya tanggal 15 April Tahun 1948 merupakan hari jadi Provinsi Sumatera Utara. Pada awal Tahun 1949 dilakukan kembali reorganisasi pemerintah di Sumatera Utara dengan Keputusan Pemerintah Darurat Republik Indonesia Nomor 22/Pem/PDRI Pada Tanggal 17 Mei Tahun 1949 yang menjelaskan jabatan Gubernur di tiadakan. Kemudian dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 pada tanggal 14 Agustus 1950 ketentuan tersebut dicabut dan dibentuk kembali Provinsi Sumatera Utara.

Pada tanggal 7 Desember Tahun 1956 di tetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1956 tentang dibentuknya Daerah Otonomi Provinsi Aceh sehingga wilayah Provinsi Sumatera Utara sebagian menjadi wilayah bagian Provinsi Aceh. Namun Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 menyebutkan bahwa “Provinsi Sumatera Utara tersebut dalam ayat (1) yang wilayahnya telah dikurangi dengan bagian-bagian yang terbentuk sebagai daerah otonomi Provinsi Aceh tetap disebut Provinsi Sumatera Utara”.

Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956, Provinsi Sumatera Utara terdiri atas 17 kabupaten/kota. Akan tetapi terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Toba Samosir, serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padang Sidempuan, selanjutnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Humbang Hasundutan Dan Pakpak Barat. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003



menjelaskan tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Serdang Bedagai, pada tahun 2007 dibentuk Kabupaten Batu Bara Melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 menjelaskan tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 menjelaskan tentang Pembentukan Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Undang-Undang 23 Tahun 2008 menjelaskan tentang Pembentukan Kabupaten Labuhan Batu Utara, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 menjelaskan tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 menjelaskan tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat dan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 menjelaskan tentang Pembentukan Kota Gunung Sitoli dengan demikian Provinsi Sumatera Utara pada Bulan Juli Tahun 2009 sudah menjadi 25 Kabupaten dan 8 Kota.

Adapun kabupaten yang berada di Wilayah Sumatera Utara yakni:

1. Kabupaten Nias
2. Kabupaten Mandailing Natal
3. Kabupaten Tapanuli Selatan
4. Kabupaten Tapanuli Utara
5. Kabupaten Toba Samosir
6. Kabupaten Labuhan Batu
7. Kabupaten Asahan
8. Kabupaten Simalungun
9. Kabupaten Dairi
10. Kabupaten Karo
11. Kabupaten Deli Serdang

12. Kabupaten Langkat
13. Kabupaten Nias Selatan
14. Kabupaten Humbang Hasundutan
15. Kabupaten Pakpak Barat
16. Kabupetn Samosir
17. Kabupaten Serdang Bedagai
18. Kabupaten Batu Bara
19. Kabupaten Padang Lawas Utara
20. Kabupaten Padang Lawas
21. Kabupaten Labuhan Batu Selatan
22. Kabupaten Labuhan Batu Utara
23. Kabupaten Nias Utara
24. Kabupaten Nias Barat

Sedangkan untuk Wilayah Kota di Sumatera Utara yakni:

1. Kota Sibolga
2. Kota Tanjung Balai
3. Kota Pematang Siantar
4. Kota Tebing Tinggi
5. Kota Medan
6. Kota Binjai
7. Kota Padang Sidempuan
8. Kota Gunung Sitoli

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 untuk membentuk dinas-dinas sebagai Institusi Teknis dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Dinas-dinasyang ada di Provinsi Sumatera Utara yakni:

1. Dinas Pertanian
2. Dinas Pertenakan
3. Dinas Pemuda dan Olah Raga
4. Dinas Pendidikan
5. Dinas Kesehatan
6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
7. Dinas Kehutanan
8. Dinas Perikanan dan Kelautan
9. Dinas Kesejahteraan dan Sosial
10. Dinas Penataan Ruang dan Pemukiman
11. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
12. Dinas Perhubungan
13. Dinas Perkebunan
14. Dinas Pendapatan
15. Dinas Bina Marga
16. Dinas Pengairan
17. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
18. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
19. Dinas Pertambangan dan Energi
20. Dinas Komunikasi dan Informasi.

## **2. Perekonomian Sumatera Utara**

Sumatera Utara kaya akan sumber daya alam yang berupa gas alam di daerah Tandam, Binjai dan minyak bumi di Pangkalan Brandan serta di Kabupaten Langkat yang telah dieksplorasi sejak zaman Hindia Belanda. Selanjutnya di Kuala Tanjung tepatnya terletak pada Kabupaten Asahan yang terdapat PT Inalum bergerak di Bidang Penambangan Biji Dan Peleburan Aluminium.

Sungai-sungai yang berhulu di pegunungan Danau Toba merupakan sumber daya alam yang cukup berpotensi akan dieksploitasi menjadi sumber daya pembangkit listrik tenaga air. PLTA Asahan merupakan PLTA terbesar di Sumatera yang terletak di Kabupaten Toba Samosir. Struktur Perekonomian Sumatera Utara menurut lapangan usaha di dominasi oleh 3 lapangan usaha yakni: pertanian, kehutanan dan perikanan serta diikuti oleh industri pengolahan maupun perdagangan ecer-eceran dan reparasi mobil/sepada motor.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah komponen yang akan mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi, karena diikuti serta oleh pengeluaran konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga dan pengeluaran konsumsi pemerintah. Ekonomi Sumatera Utara mengalami kontraksi bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini disebabkan oleh efek musiman beberapa komoditi pertanian, kehutanan dan perikanan dari sisi pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada beberapa komponen.

## **3. Seni dan Budaya**

Sumatera Utara merupakan daerah yang kental dengan adat istiadatnya, seperti musik yang biasa dimainkan saat upacara-upacara adat yang diadakan,

akan tetapi lebih dominan pada genderangnya seperti pada Etnis Pesisir yang terdapat serangkaian alat musik yang sering disebut Sikambang. Dalam bidang seni rupa yang sangat menonjol adalah arsitektur rumah adat yang perpaduan dari seni pahat dan seni ukir beserta hasil dari seni kerajinan. Di Samosir banyak ditemui rumah adat etnis batak yang berdiri dengan kukuh dan megah. Rumah adat Karo kelihatan besar dan lebih tinggi serta memiliki ciri khas pada atap yang menjulang berlapis-lapis. Sedangkan untuk Kabupaten Simalungun rumah adatnya cukup memikat hati saat melihatnya dimana terdiri atas beberapa bangunan yakni rumah balon, balai balon, jemur, pantangan balai dan lesung. Sumatera Utara memiliki rumah adat ciri khas pada adat rumah melayu yang lebih dominan berwarna hijau, dan untuk Sibolga memiliki rumah adat yang kukuh di halaman Gedung Nasional Sibolga.

Makanan khas Sumatera Utara sangat bervariasi dan tergantung pada daerahnya sendiri. Pak-pak Barat memiliki makanan khas seperti *pelleng* yang memiliki bumbu yang sangat pedas. Sedangkan untuk di tanah batak *dengke naniarsik* merupakan ikan yang digulai tanpa kelapa/santan, tetapi untuk cita rasa tanah batak merupakan pecinta makanan yang santan dan pedas, untuk minumannya tanah batak lebih suka dengan *pasituak natonggi* yang artinya minuman nira atau tuak.

Ulos merupakan kain adat batak yang digunakan dalam upacara-upacara perkawinan, kematian dan kesenian. Bahan kain ulos terbuat dari benang kapas dan memiliki warna hitam, putih dan merah memiliki makna tertentu, sedangkan warna yang lain hanya sebagai lambing dari variasi kehidupan. Pada suku Pak-pak tenun diberi nama *oles* yang memiliki warna dasar kain hitam kecoklatan dan

putih. Suku Karo member nama tenun adalah *uis* yang memiliki warna dasar biru tua dan kemerahan.

#### **4. Visi Dan Misi Provinsi Sumatera Utara**

Visi:

“Sumatera Utara Yang Maju, Aman dan Bermartabat”.

Misi:

1. Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara Bermartabat Dalam Kehidupan karena memiliki iman dan takwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencarian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau.
2. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Politik dengan adanya pemerintah yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis.
3. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kalaboratif, berdaya saing, dan mandiri.
4. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Bermartabat Dalam Pergaulan bebas dari judi, narkoba, prositusi, dan penyeludupan sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia.

5. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan serta beradab.

Berdasarkan Visi dan Misi di atas, maka telah ditetapkan Prioritas Pembangunan yang ditunjukkan pada:

1. Peningkatan kesempatan kerja serta akan menciptakan penyediaan lapangan pekerjaan.
2. Peningkatan dan pemenuhan akses pendidikan akan diutamakan.
3. Pembangunan infrastruktur yang baik serta berwawasan lingkungan.
4. Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas tinggi.
5. Peningkatan daya saing yang melalui sektor agraris dan pariwisata.

## **5. Deskripsi Variabel Penelitian**

Populasi penelitian ini merupakan dari Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 33 Kabupaten/Kota yang berada di Sumatera Utara. Setelah dilakukan pemilihan sampel dengan kriteria khusus maka pengambilan sampel ini dipilih sebanyak 10 Kabupaten dan 3 Kota dengan periode penelitian dilakukan mulai dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017. Data penelitian secara keseluruhan berjumlah 52 sampel (13 kabupaten/kota X 4 tahun laporan realisasi penerimaan APBD). Adapun variabel penelitian yang diamati dalam penelitian ini sebagai berikut:

### a. Pendapatan Asli Daerah

Data variabel bebas ( $X_1$ ) dalam penelitian ini yakni Pendapatan Asli

Daerah dan berikut ini adalah data sebagai berikut:

Tabel 4.1 Laporan Anggaran Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014-2017 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

No	Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017
1	Kab. Asahan	91.468.218.559	98.279.308.429	52.170.348.430	107.890.187.769
2	Kab. Deli Serdang	433.885.507.126	515.293.681.488	573.010.351.005	662.615.775.000
3	Kab. Karo	72.914.095.471	87.644.277.141	99.913.302.299	40.831.129.979
4	Kab. Labuhan Batu	109.896.912.458	101.023.216.259	125.925.267.724	163.989.690.295
5	Kab. Langkat	107.811.975.547	122.715.359.910	132.673.213.413	131.076.423.284
6	Kab. Mandailing Natal	37.965.692.368	63.847.458.130	70.405.901.828	100.111.769.563
7	Kab. Simalungun	96.390.208.715	111.893.282.770	132.560.800.826	213.789.585.400
8	Kab Tapanuli Selatan	95.588.202.103	109.349.451.811	76.640.675.841	81.435.846.816
9	Kab. Serdang Bedagai	74.762.406.401	80.141.929.203	108.062.776.483	102.479.860.648
10	Kab. Batu Bara	45.218.061.026	51.514.120.899	59.388.277.802	28.231.281.234
11	Kota Medan	1.384.246.114.730	1.489.723.189.089	1.535.309.574.015	1.973.780.338.563
12	Kota Binjai	71.967.137.635	78.327.792.811	97.339.497.584	98.283.092.444
13	Kota Pematang Siantar	90.477.498.257	95.557.865.286	101.582.731.955	116.508.915.582

Sumber : Diperoleh dari Kementerian Keuangan Sumatera Utara, 2019

Dari tabel diatas, dapat dilihat pendapatan asli daerah mengalami peningkatan dan penurun di Kabupaten/Kota. Pada Kabupaten Asahan tahun 2016 mengalami penurun sebesar Rp.52.170.348.430, namun di tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp.107.890.187.769. Kabupaten Karo mengalami penurunan di tahun 2017 sebesar Rp.40.831.129.979, tahun sebelumnya mengalami peningkatan. Kabupaten Langkat mengalami penurunan di tahun 2017 sebesar Rp.131.076.423.284. Kabupaten Tapanuli Selatan mengalami penurunan tahun 2016 sebesar Rp.76.640.675.841, namun di tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp.81.435.846.816. Kabupaten Serdang Bedagai mengalami penurunan sebesar Rp.102.479.860.648. Anggaran penerimaan pendapatan asli daerah terkecil di Kabupaten Batu Bara pada tahun 2017 sebesar Rp.28.231.281.234.



### b. Belanja Daerah

Dari data variabel terikat (Y) dalam penelitian ini merupakan belanja daerah dan berikut adalah data variabel terikat yakni:

Tabel 4.2 Laporan Anggaran Realisasi Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2017

No	Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017
1	Kab. Asahan	1.388.135.949.420	1.395.720.714.939	1.501.954.701.574	1.550.420.215.474
2	Kab. Deli Serdang	2.392.252.735.840	2.735.624.354.971	3.005.435.386.844	3.497.039.137.164
3	Kab. Karo	889.667.378.450	1.326.869.180.996	1.542.011.009.416	233.618.739.317
4	Kab. Labuhan Batu	915.110.451.097	1.019.728.251.640	1.194.338.054.774	1.357.678.632.932
5	Kab. Langkat	1.605.301.211.465	1.934.943.728.402	2.287.199.857.315	2.238.385.764.148
6	Kab. Mandailing Natal	972.738.850.695	1.245.111.632.560	1.459.576.624.438	1.563.819.372.565
7	Kab. Simalungun	1.648.278.603.129	1.824.943.465.853	2.185.034.609.508	2.304.907.688.629
8	Kab. Tapanuli Selatan	862.248.440.427	1.119.177.035.203	1.176.894.126.494	1.191.928.498.270
9	Kab. Serdang Bedagai	1.010.452.029.829	1.114.473.883.118	1.465.701.623.031	1.386.104.799.773
10	Kab. Batu Bara	791.504.676.902	903.322.939.973	1.128.446.893.922	1.063.041.449.881
11	Kota Medan	3.723.643.299.086	4.374.968.274.137	4.525.231.330.995	5.493.560.943.295
12	Kota Binjai	804.308.312.949	885.211.617.571	945.566.273.546	914.618.290.540
13	Kota Pematang Siantar	774.365.721.075	884.146.657.676	940.141.429.607	1.063.470.020.440

Sumber : Diperoleh dari Kementerian Keuangan Sumatera Utara, 2019

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat belanja daerah mengalami peningkatan dan penurunan di Kabupaten/Kota. Pada Kabupaten Karo mengalami penurunan tahun 2017 sebesar Rp.233.618.739.317, namun tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp.1.542.011.009.416. Kabupaten Serdang Bedagai mengalami peningkatan tahun 2016 sebesar Rp.1.465.701.623.031, tetapi di tahun 2017 mengalami penurunan sebesar Rp.1.386.104.799.773. Kabupaten Batu Bara mengalami peningkatan tahun 2016 sebesar Rp.1.128.446.893.922, tetapi di tahun 2017 mengalami penurunan sebesar Rp.1.063.041.449.881. sedangkan untuk kota yang mengalami penurunan yaitu Kota Binjai tahun 2017 sebesar Rp.914.618.290.540.

### c. Dana Perimbangan

Data dari variabel intervensi (Z) adalah dana perimbangan dan berikut adalah datanya yakni:

Tabel 4.3 Laporan Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2017

No	Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017
1	Kab. Asahan	918.597.777.626	965.041.336.384	1.188.340.367.058	1.398.059.730.290
2	Kab. Deli Serdang	1.524.671.888.347	1.565.271.496.813	1.974.004.465.463	2.174.505.511.040
3	Kab. Karo	761.711.483.878	850.087.455.305	1.040.055.892.716	510.679.967.722
4	Kab. Labuhan Batu	641.297.033.851	707.284.674.013	1.005.470.238.990	956.517.837.000
5	Kab. Langkat	1.260.298.417.984	1.390.565.543.763	1.732.717.434.638	1.868.902.371.908
6	Kab. Mandailing Natal	805.812.253.841	856.846.422.230	1.055.984.803.941	1.086.204.333.000
7	Kab. Simalungun	1.225.270.110.745	1.247.469.763.643	1.618.580.654.169	1.787.150.548.692
8	Kab. Tapanuli Selatan	679.283.446.041	749.637.195.743	942.141.001.304	860.325.451.870
9	Kab. Serdang Bedagai	810.807.637.654	867.189.090.713	1.077.784.187.979	1.063.448.145.000
10	Kab. Batu Bara	668.851.405.909	665.570.072.713	864.938.764.513	846.733.744.588
11	Kota Medan	1.598.113.512.931	1.355.644.466.363	1.900.853.852.448	2.236.515.051.000
12	Kota Binjai	585.699.016.088	604.168.845.881	747.927.480.220	719.167.216.158
13	Kota Pematang Siantar	579.535.032.088	609.312.359.513	756.797.369.354	766.128.238.000

Sumber : Diperoleh dari Kementerian Keuangan Sumatera Utara, 2019

Berdasarkan tabel diatas, dana perimbangan mengalami penurunan dan peningkatan dalam kurun 4 tahun di 13 Kabupaten/Kota. Pada tahun 2017 dana perimbangan mengalami penurunan di 5 Kabupaten dan 1 Kota yakni Kabupaten Karo sebesar Rp.510.679.967.722, Kabupaten Labuhan Batu sebesar Rp.956.517.837.000, Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar Rp.860.325.451.870, Kabupaten Serdang Bedagai sebesar Rp.1.063.448.145.000, Kabupaten Batu Bara sebesar Rp.846.733.744.588, dan Kota Binjai sebesar Rp.719.167.216.158. Penurunan dana perimbangan akan membuat suatu daerah tidak berkegantungan terhadap pemerintah pusat.

## 6. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan untuk mendeskripsikan dari data dalam penelitian ini yang mengenai Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah dan Dana Perimbangan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. Mulai dari mean dan standar deviasi. Dalam metode ini menggunakan bantuan aplikasi SPSS yang dapat dilihat pada tabel deskriptif sebagai berikut:

**Tabel 4.4 Statistik Deskriptif**

Descriptive Statistics			
	Mean	Std. Deviation	N
Log_Y	27.9755	.55093	52
Log_X	25.5611	.95397	52
Log_Z	27.6418	.38510	52

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS versi 17.0

Dari hasil data statistik deskriptif diatas menunjukkan jumlah data (n) sebanyak 52 sampel dan nilai valid (n) sebesar 52 yang menunjukkan banyak jumlah sampel yang digunakan. Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai mean sebesar 25.5611 dan nilai standar deviasi sebesar 0.95397 lebih kecil dari mean hal ini menunjukkan distribusi data cenderung normal.

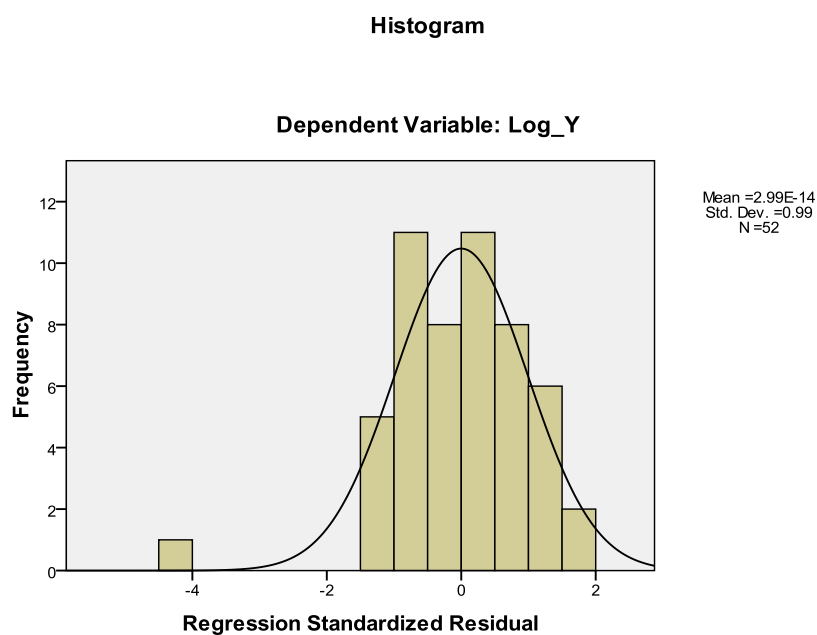
Belanja daerah memiliki nilai mean sebesar 27.9755 dan nilai standar deviasi sebesar 0.55093 lebih kecil dari mean hal ini menunjukkan distribusi data cenderung normal. Dana perimbangan memiliki nilai mean sebesar 27.6618 dan nilai standar sebesar 0.38510 lebih kecil dari mean hal ini menunjukkan distribusi data cenderung normal.

## 7. Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian regresi linier sederhana dapat dilakukan setelah penelitian ini memenuhi syarat yaitu lulus dari asumsi klasik. Dalam pengujian asumsi klasik digunakan asumsi-asumsi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji heterokedastisitas.

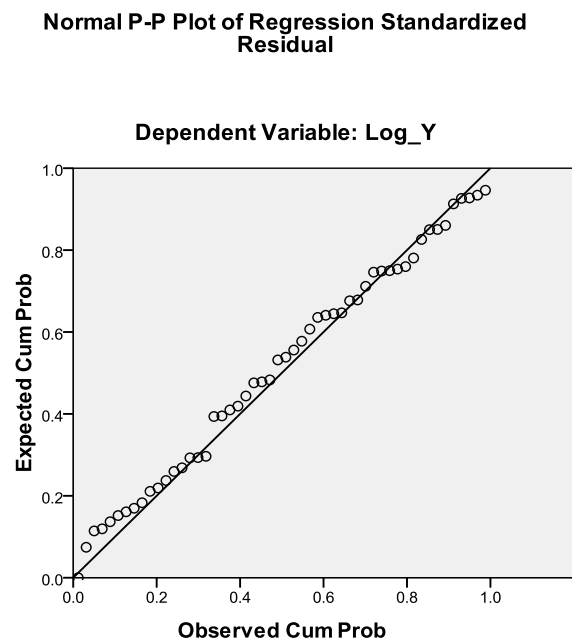
### a. Uji Normalitas Data

Uji normalitas dilakukan untuk menguji model regresi yang dibentuk dari variabel dependen dan variabel independen yang mempunyai distribusi normal.



**Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas dengan Histogram**  
Sumber : Hasil pengolahan Data SPSS vesri 17.0

Berdasarkan gambar histogram di atas menunjukkan data menyebar di garis diagonal dan mengikuti arah garis, maka model regresi dinyatakan normal dan telah memenuhi asumsi normalitas.



**Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas dengan P-Plot**  
 Sumber : Hasil pengolahan data SPSS Versi 17.0, 2019

Berdasarkan gambar P-Plot diatas menunjukkan data yang digunakan sebagai sampel penelitian adalah normal. Pada gambar P-Plot terdapat titik-titik yang menyebar tidak terpencar jauh dari garis diagonal penyebaran tersebut mengikuti arah garis diagonal dan dinyatakan normal sehingga memenuhi asumsi normalitas.

#### **b. Uji Multikolinearitas**

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji model regresi yang ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Menurut Rusiadi (2014:154) “Nilai yang umum dipakai untuk tidak menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai Tolerance  $> 0,10$  dan nilai VIF  $< 10$ ”.

**Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinearitas**

		Coefficients <sup>a</sup>						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	-3.144	1.895		-1.659	.103		
	Log_X	.220	.035	.380	6.202	.000	.498	2.008
	Log_Z	.923	.088	.645	10.517	.000	.498	2.008

a. Dependent Variable: Log\_Y

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS versi 17.0

Berdasarkan tabel *coefficients* di atas menunjukkan bahwa tidak ada gejala multikolinearitas antar variabel bebas dalam metode regresi, dimana pendapatan asli daerah dan dana perimbangan memiliki nilai Tolerance sebesar  $0.498 > 0.10$  dan nilai VIF sebesar  $2.008 < 10$ .

### c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi penelitian ini menggunakan Durbin-Watson sebesar 1.697, jumlah data ( $n$ )=52 dan  $dL$  sebesar 1.503  $dU$  sebesar 1.585, maka nilai DW dalam penelitian sebesar 1.697 yaitu berada diantara  $dU < DW < 4-dU$  ( $1.585 < 1.697 < 2.415$ ). Sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian tidak terdapat masalah atau gejala autokorelasi. Dengan demikian analisis regresi sederhana untuk uji hipotesis pada penelitian ini dapat dilakukan atau dilanjutkan yang mana dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.6 Uji Autokorelasi**

Model Summary<sup>b</sup>

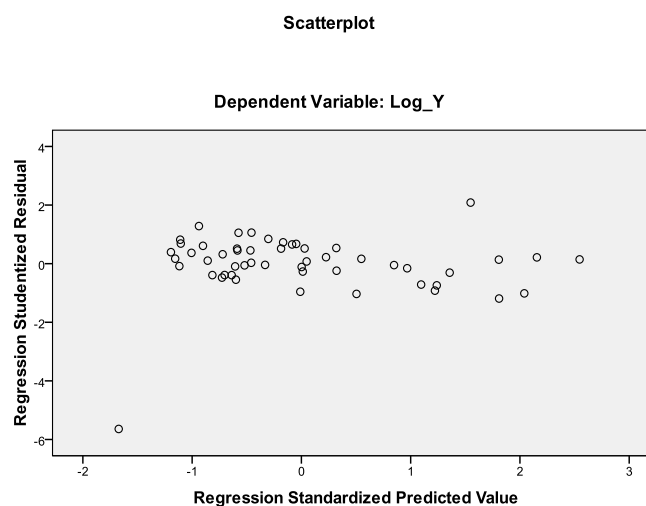
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.837 <sup>a</sup>	.701	.695	.30423	.701	117.250	1	50	.000	1.697

a. Predictors: (Constant), Log\_X

Sumber : Diolah Dari SPSS Versi 17.0, 2019

#### d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas menggunakan *scatterplot* dan variabel yang akan di uji adalah pendapatan asli daerah dan dana perimbangan, maka dapat dilihat dari gambar bahwa *scatterplot* menunjukkan titik-titik yang dihasilkan menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu. Scatterplot penelitian ini menunjukkan tidak ada terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi dan terdapat kesamaan varian dari residu untuk semua pengamatan pada model regresi.



**Gambar 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Scatterplot**

Sumber: Output SPSS Versi 17.0, 2019

## 8. Uji Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi linier sederhana bertujuan untuk mengukur besarnya pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Berikut ini adalah hasil uji regresi linier sederhana dengan menggunakan Program SPSS versi 17.0 untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah secara langsung:

**Tabel 4.7 Coefficients (hipotesis 1)**

		Coefficients <sup>a</sup>									
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Correlations			Collinearity Statistics	
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)	15.616	1.142		13.671	.000					
	Log_X	.484	.045	.837	10.828	.000	.837	.837	.837	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Log\_Y

Sumber: Output SPSS, diolah penulis, 2019

Pada tabel diatas, maka persamaan regresi linier sederhana penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = 15.616 + 0.484X$$

Dari persamaan regresi diatas maka dapat dilihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yaitu:

1. Jika variabel independen dianggap konstanta dan bernilai positif maka nilai belanja daerah (Y) adalah sebesar 15.616
2. Jika koefisien regresi pendapatan asli daerah terus ditingkatkan 1 satuan maka belanja daerah akan meningkat sebesar 0.484

## 9. Uji Analisis Jalur



Uji analisis jalur digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah melalui dana perimbangan sebagai variabel *intervening*. Uji ini dilakukan untuk menguji hipotesis 2 pada penelitian agar mengetahui ada atau tidaknya pengaruh tidak langsung yang diberikan variabel pendapatan asli daerah melalui dana perimbangan sebagai variabel *intervening* terhadap belanja daerah. Berikut adalah tabel regresi 1 pada uji analisis jalur:

**Tabel 4.8 Coefficients 1 (hipotesis 2)**

Coefficients <sup>a</sup>											
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)	15.616	1.142		13.671	.000					
	Log_X	.484	.045	.837	10.828	.000	.837	.837	.837	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Log\_Y

Sumber: Output SPSS Versi 17.0, 2019

**Tabel 4.9 Coefficients 2 (hipotesis 2)**

Coefficients <sup>a</sup>											
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)	-3.144	1.895		-1.659	.103					
	Log_X	.220	.035	.380	6.202	.000	.837	.663	.268	.498	2.008
	Log_Z	.923	.088	.645	10.517	.000	.914	.832	.455	.498	2.008

a. Dependent Variable: Log\_Y

Sumber: Output SPSS Versi 17.0, 2019

Persamaan analisis jalur untuk hipotesis 2 adalah sebagai berikut:

$$Y = -3.144 + 0.220 X + 0.923 Z + e$$

Keterangan:

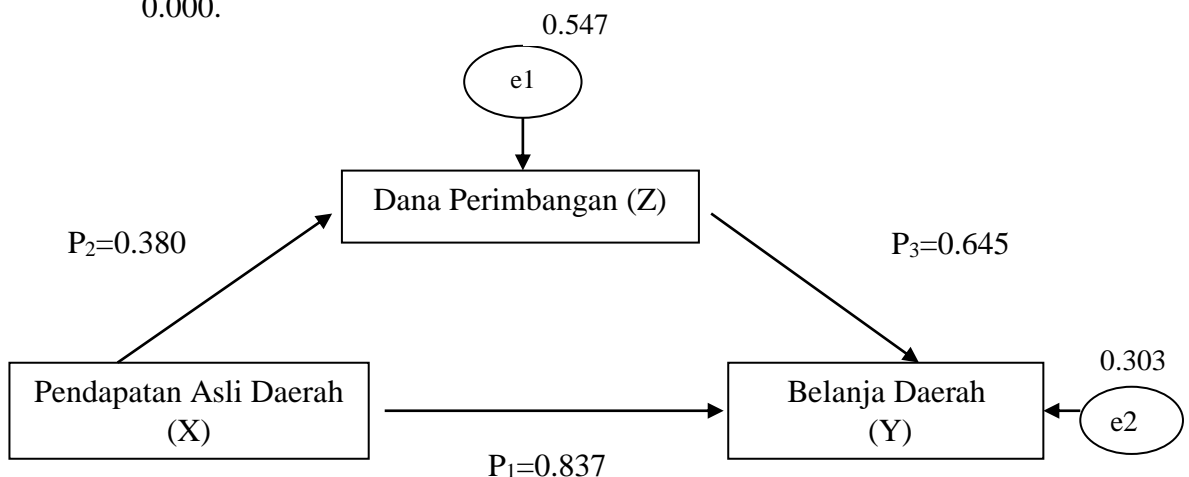
Y = Belanja Daerah

X = Pendapatan Asli Daerah

Z = Dana Perimbangan

Berdasarkan persamaan regresi di atas maka dapat dianalisis masing-masing pengaruh dari variabel sebagai berikut:

- 1) Jika segala sesuatu pada variabel independen dan intervening dianggap konstanta maka nilai belanja daerah (Y) sebesar -3.144.
- 2) Jika pendapatan asli daerah (X) terus ditingkatkan sebesar 1 satuan maka belanja daerah (Y) akan meningkat sebesar 0.220 dan signifikan pada 0.000.
- 3) Jika dana perimbangan (Z) terus ditingkatkan sebesar 1 satuan maka belanja daerah (Y) akan meningkat sebesar 0.923 dan signifikan pada 0.000.



Berdasarkan hasil penelitian dari gambar di atas, hasil analisis jalur menunjukkan pendapatan asli daerah dapat berpengaruh langsung terhadap

belanja daerah dan dapat juga berpengaruh tidak langsung dari pengaruh pendapatan asli daerah ke dana perimbangan (sebagai variabel intervening) lalu ke belanja daerah dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Besarnya pengaruh langsung pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah adalah ( $P_1$ ) 0.837
2. Besar pengaruh tidak langsung pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah melalui dana perimbangan adalah ( $P_2XP_3$ )  $0.380 \times 0.645 = 0.2451$
3. Besarnya pengaruh total sebagai mediasi pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah melalui dana perimbangan (pengaruh langsung + pengaruh tidak langsung) adalah  $0.837 + 0.2451 = 1.0821$ .

Pengaruh mediasi yang ditunjukkan oleh perkalian koefisien ( $P_2XP_3$ ) sebesar 0.2451 signifikan atau tidak, maka diuji dengan Sobel test sebagai berikut:

$$Sp_{2p3} = \sqrt{p_3^2 Sp_2^2 + p_2^2 Sp_3^2 + Sp_2^2 Sp_3^2}$$

$$Sp_{2p3} = \sqrt{(0.923)^2(0.045)^2 + (0.484)^2(0.088)^2 + (0.045)^2(0.088)^2}$$

$$Sp_{2p3} = \sqrt{0.001725156225 + 0.001814078464 + 0.0000156816} = 0.0596$$

Berdasarkan hasil  $Sp_{2p3}$  dapat dihitung nilai t statistik pengaruh mediasi dengan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{p_{2p3}}{Sp_{2p3}} = \frac{0.4467}{0.0596} = 7.4950$$

Oleh karena nilai t hitung = 7.4950 lebih besar dari t tabel dengan tingkat signifikan 0.05 yaitu sebesar 1.96, maka dapat disimpulkan bahwa koefisien mediasi 0.2451 signifikan yang berarti ada pengaruh mediasi variabel dana perimbangan sebagai variabel *intervening*.

## 10. Pengujian Hipotesis

Setelah melakukan uji analisis jalurselanjutnya untuk menguji hipotesis maka uji yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

### a. Uji Regresi Parsial (t)

Uji regresi parsial untuk hipotesis 1 guna untuk mengetahui pengaruh secara langsung pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah. Berdasarkan hasil tabel *coefficients* pada hipotesis 1 dilihat dari *standardize coefficients beta* bernilai positif sebesar 0.837 dan signifikansi sebesar 0.000. Hal ini menunjukkan terdapat pengaruh positif yang signifikan antara variabel pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah secara langsung. Pada hipotesis 2, hasil tabel *coefficients* menunjukkan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan yang sebagai variabel *intervening* sebesar 0.000 dan 0.000 juga terdapat pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah karena nilai signifikansi  $< 0.05$ . Nilai *standardize coefficients beta* pada pendapatan asli daerah sebesar 0.380 dan nilai *standardize coefficients beta* pada dana perimbangan sebagai variabel *intervening* sebesar 0.645 terhadap belanja daerah. Dengan melihat koefisien jalur pendapatan asli daerah bernilai positif artinya pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Sedangkan koefisien jalur dana perimbangan juga memiliki nilai positif yang artinya dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.

### b. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi pada hipotesis 1 dan regresi 1 menunjukkan bahwa  $R^2$  bernilai 0.695, hal ini berarti 69.5% variasi belanja daerah dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel pendapatan asli daerah. Sedangkan sisanya 30.5% dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain diluar model. Berikut ini tabel *model summary* untuk melihat nilai regresi 1 pada hipotesis 2 :

**Tabel 4.10 Model Summary (Regresi 1 Hipotesis 1)**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change
1	.837 <sup>a</sup>	.701	.695	.30423	.701

a. Predictors: (Constant), Log\_X

b. Dependent Variable: Log\_Y

Sumber :Diolah Dari SPSS Versi 17.0, 2019

Sedangkan pada regresi jalur hipotesis 2, terdapat perbedaan nilai *R Square* antara regresi 2 hipotesis 2. Namun hasil ini juga tetap menunjukkan bahwa kemampuan variabel pendapatan asli daerah melalui variabel *intervening* yaitu dana perimbangan dalam menjelaskan variasi belanja daerah menunjukkan sebesar 90.4% proposi pengaruh pendapatan asli daerah melalui dana perimbangan sebagai variabel *intervening* dan sisanya 9.6% dipengaruhi faktor lain. Dapat dilihat tabel *Model Summary* dibawah ini:

**Tabel 4.11 Model Summary (Regresi 2 Hipotesis 2)**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change
1	.953 <sup>a</sup>	.908	.904	.17028	.908

a. Predictors: (Constant), Log\_Z, Log\_X

b. Dependent Variable: Log\_Y

Sumber :Diolah Dari SPSS Versi 17.0, 2019

## B. Pembahasan

Pembahasan mengenai rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah**

Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah secara langsung dilakukan dengan metode regresi linier sederhana dan pengujian hipotesis dilakukan dengan uji regresi (t) dan koefisien determinasi. Pada metode regresi linier sederhana, maka terdapat persamaan regresi yang berasal dari tabel *coefficient* sebagai berikut:

$$Y = 15.616 + 0.484 + e$$

Pada persamaan tersebut terdapat nilai koefisien regresi variabel pendapatan asli daerah (X) sebesar 0.484 yang bernilai positif menunjukkan terjadi peningkatan pada pendapatan asli daerah maka nilai belanja daerah juga akan meningkat sebesar 0.484. Pada koefisien determinasi, Adjust R Square yang dihasilkan bernilai 0.695. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel pendapatan asli daerah dalam menjelaskan variasi belanja daerah sebesar 69.5% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain selain pendapatan asli daerah.

Uji regresi parsial untuk hipotesis 1 guna mengetahui pengaruh secara langsung pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah. Berdasarkan hasil tabel *coefficients* pada hipotesis 1 adalah pada uji t, nilai signifikan t pendapatan asli daerah bernilai 0.000 dimana  $t < 0.05$  dan koefisien  $\beta$  bernilai positif sebesar 0.837 yang berarti bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan secara langsung variabel pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, maka dapat diketahui nilai pengaruh pendapatan asli daerah memang lebih besar pengaruhnya terhadap belanja daerah dan signifikan

sehingga bisa dikatakan hipotesis 1 diterima. Hasil ini konsisten dengan riset yang dilakukan oleh Henri (2009) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah dengan meningkatnya pendapatan asli daerah sudah tentu pendapatan daerah akan meningkat dikarenakan pendapatan asli daerah merupakan komponen dari pendapatan daerah yang akan diikuti oleh dengan meningkatnya belanja daerah akan berdampak pada kemakmuran rakyat.

## **2. Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah melalui dana perimbangan sebagai variabel *intervening*.**

Pengujian hipotesis dilakukan uji koefisien determinasi dan uji t dengan menggunakan teknik analisis jalur. Maka persamaan jalur yang berasal dari tabel *coefficient* sebagai berikut:

$$Y = -3.144 + 0.220X + 0.923Z$$

Pada persamaan terdapat nilai koefisien jalur variabel pendapatan asli daerah (X) sebesar 0.220 yang bernilai positif menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pendapatan asli daerah maka nilai koefisien belanja daerah akan meningkat sebesar 0.220. Namun nilai koefisien jalur dana perimbangan bernilai positif juga sebesar 0.923 sehingga apabila terjadi peningkatan dana perimbangan maka nilai belanja daerah meningkat sebesar 0.923. Pada koefisien determinasi, *Adjust R Square* yang dihasilkan sebesar 0.904 yang artinya kemampuan variabel pendapatan asli daerah dan dana perimbangan dalam menjelaskan variasi belanja daerah sebesar 90.4% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain selain pendapatan asli daerah dan dana perimbangan.

Sedangkan pada uji t, nilai signifikan t pendapatan asli daerah bernilai 0.000 dimana  $t_{hitung} < 0.05$  yang berarti bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel pendapatan asli daerah. Adapun nilai uji t pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah melalui dana perimbangan sebagai variabel *intervening* bernilai  $t_{hitung}$  sebesar 7.4950 >  $t_{tabel}$  sebesar 1.96, yang berarti memiliki pengaruh signifikan sebagai variabel *intervening*. Pada penelitian ini pendapatan asli daerah melalui dana perimbangan terhadap belanja daerah adalah dengan mengalikan nilai *standardize coefficient beta* pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah pada hipotesis 1 dengan nilai *standardize coefficients beta* dana perimbangan terhadap belanja daerah pada tabel hipotesis 2 yaitu  $0.380 \times 0.645 = 0.2451$ . Menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsung lebih kecil sehingga bisa dikatakan bahwa dana perimbangan merupakan variabel *intervening* antara pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah. Hal ini konsisten dengan hasil yang dilakukan oleh Masayu (2017) yang menyatakan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah mempunyai pengaruh positif dan signifikan melalui dana perimbangan yang bersifat bantuan dari pemberian pemerintah pusat yang ditujukan untuk mengatasi kesenjangan fiskal terhadap pendanaan kebutuhan daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintah daerah. Jauh lebih baik menggunakan pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah sehingga dapat memberikan kewenangan dan keleluasaan yang luas bagi pemerintah daerah untuk mendanai belanja daerah sebagai kebutuhan daerah serta untuk mewujudkan kemandirian daerah dalam kemampuan fiskal.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijelaskan maka kesimpulan yang dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah:

1. Uji regresi parsial hipotesis 1 menunjukkan pengaruh secara langsung pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah. Berdasarkan hasil *table coefficients* pada hipotesis 1 adalah nilai uji t pendapatan asli daerah signifikan bernilai 0.000 dimana  $t < 0.05$  dan koefisien  $\beta$  bernilai positif sebesar 0.837 yang berarti bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan secara langsung variabel pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah dan memiliki pengaruh langsung pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah sebesar  $P_1=0.837$ .
2. Nilai signifikan uji t pendapatan asli daerah dan dana perimbangan sebagai variabel *intervening* bernilai 0.000 dan 0.000 dimana  $t < 0.05$  yang berarti bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel pendapatan asli daerah melalui dana perimbangan sebagai variabel *intervening*. Besar pengaruh tidak langsung pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah melalui dana perimbangan yaitu sebesar  $0.380 \times 0.645 = 0.2451$  yang artinya pengaruh langsung lebih besar dari pada pengaruh tidak langsung.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil simpulan yang diperoleh dari penelitian ini, saran yang dapat diberikan penulis sebagai berikut:

1. Untuk mengurangi dana perimbangan maka pemerintah sebaiknya lebih memperhatikan lagi pendapatan asli daerahnya dengan banyak pendapatan di daerah tersebut terutama pada pendapatan yang berasal dari pendapatan asli daerah maka ketergantungan terhadap pemerintah pusat akan berkurang.
2. Untuk meningkatkan belanja daerah maka pemerintah daerah diharapkan terus menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah dan dapat memanfaatkan dana yang diperoleh dari daerahnya sendiri seperti pajak daerah, retribusi, hasil kekayaan yang dipisahkan dan PAD yang sah serta dana perimbangan untuk membangun infrastruktur publik yang dibutuhkan oleh masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aprizay, dkk. 2014. *Pengaruh Pendapatan Asli daerah, Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh* ,Jurnal Akuntansi, Pascasarjana Universitas SyahKuala. ISSN 2302-0164 pp 140-149 volume 3.
- Arnita, V., & Aulia, A. (2020). Prekdisi Pertumbuhan Laba Dalam Rasio Keuangan Pada PT JAPFA COMFEED TBK. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 11(1), 115-122.
- Barus, M. D. B., & Azzahra, A. S. (2020). Analisis Aplikasi Dan Penerapan Matematika Pada Ilmu Ekonomi Fungsi Permintaan Dan Penawaran. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 11(1), 103-114.
- Barus, M. D. B., & Hakim, A. (2020). Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika melalui Metode *Practice Rehearsal Pairs* pada Siswa SMA Al-Hidayah Medan. *Biormatika: Jurnal ilmiah fakultas keguruan dan ilmu pendidikan*, 6(1), 74-78.
- Budi, Purnomo S. 2009. *Sumber Penerimaan Daerah*. Alfabet: Bandung.
- Chrisna, H. (2019). Pengaruh Perilaku Belajar, Pengendalian Diri, Motivasi, Empati, Keterampilan, Dan Kepercayaan Diri Terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa Prodi Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 10(1), 87-100.
- Chrisna, H., Karin, A., & Hasibuan, H. A. (2020). Analisis Sistem Dan Prosedur Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Dengan Akad Pembiayaan Murabahah Pada PT. BANK BRI Syariah Cabang Medan. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 11(1), 156-166.
- Daud, Wido Immanuel. 2017. *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2011-2015*. Skripsi Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.
- Djaenuri, Aries. 2012. *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Dwilita, H., & Sari, P. B. (2020). Analisis Pengelolaan Keuangan Keluarga dan Literasi Keuangan Wanita di Dusun 20 Desa Klambir Lima Kebun. *Jurnal AKMAMI (Akuntansi Manajemen Ekonomi)*, 1(3), 184-197.
- Fadly, Y. (2019). Performa Mahasiswa Akuntansi Dalam Implementasi *English For Specific Purpose* (ESP) Di Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) MEDAN. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(2), 190-201.
- Fani, Wiraswasta. 2009. *Pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal di Kota dalam Wilayah Jawa Timur*. *Jurnal Bisnis dan Manajemen* Vol 5 Nomor 2, p170-180, ISSN.

- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang :Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Henri, Edison H. Panggabean. 2009. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Toba Samosir*. Tesis, Universitas Sumatera Utara.
- Hernawaty, H., Chrisna, H., & Junawan, J. (2020). Analisa Penggunaan *Forward Contract Hedging* pada Nilai Ekspor Barang Ekonomi Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal AKMAMI (Akuntansi Manajemen Ekonomi)*, 1(3), 95-109.
- I, Putu Irawan. 2016. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening*. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Unud, 5(3) : 338-362. ISSN 2303-0178.
- Maisyarah, R. (2018). *Analysis of the Determinants Competition Oligopoly Market Telecommunication Industry in Indonesia*. *KnE Social Sciences*, 760-770.
- Masayu, Rahma Wati. 2017. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung*. *Jurnal Kajian Akuntansi* , Vol 1 (1), 63-76 e2579-9991, p2579-9975.
- Nasution, A. P. (2018). Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah Dilingkungan Kecamatan Datuk Bandar Tanjung Balai. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(2), 15-25.
- Nasution, A. P. (2019). Implementasi *E-Budgeting* Sebagai Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kota Binjai. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 9(2), 1-13.
- Nasution, D. A. D. (2018). Analisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah. *Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan*, 2(3), 149-162.
- Nasution, D. A. D. (2019, August). *The Effect of Implementation Islamic Values and Employee Work Discipline on The Performance of Moslem Religious Employees at Regional Financial Management in the North Sumatera Provincial Government*. In *International Halal Conference & Exhibition 2019 (IHCE)* (Vol. 1, No. 1, pp. 1-7).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 *Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 *Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*. Departemen Komunikasi dan Informatika. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 *Tentang Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil*.
- PSAP No. 02 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010.

Purba, R. B. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(1), 99-111.

Ritonga, M. (2018). Faktor Manajemen Biaya Dan Manajemen Pemasaran Terhadap Pendapatan Melalui Intensitas Produksi Pada Ukm Industri Rumahan Di Kota Binjai. *JUMANT*, 8(2), 68-78.

Rusiadi, dkk. 2014. *Metode Penelitian* :Usu Press.

Sari, M. N. (2020). Pengaruh *Return On Asset, Financial Leverage, Dan Trading Volume* Terhadap *Initial Return*. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 11(1), 18-27.

Sari, P. B. (2020). Analisis Opini *Going Concern* Pada Perusahaan Farmasi di Bursa Efek Indonesia (*Multiple Correlation Method*). *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 10(2), 189-196.

Sari, R.P.& Indrajaya, I.G.B, 2014. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Bandung*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(9), hal. 420-427

Sarwono, Jonathan. 2012. *Metode Riset Skripsi Pendekatan Kuantitatif Menggunakan Prosedur SPSS* (Edisi Pertama). Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Yunus, R. N. (2020). Analisis Multimodal Pada Iklan Layanan Masyarakat. *JUMANT*, 12(2), 83-89.

Sugiyono.2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung. CV Alfabeta

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah*.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 *Keuangan Pusat dan Daerah*.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

[www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)

[www.sumutprov.go.id](http://www.sumutprov.go.id)